

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan



PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KOTA PALEMBANG

Direktorat
budayaan

16

ARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
BAGIAN PROYEK PENELITIAN PENGKAJIAN DAN
PEMBINAAN NILAI - NILAI BUDAYA
SUMATERA SELATAN

1993/1994

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

711.4816
TRI
P



PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KOTA PALEMBANG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
BAGIAN PROYEK PENELITIAN PENGKAJIAN DAN
PEMBINAAN NILAI - NILAI BUDAYA
SUMATERA SELATAN
1993/1994

TIM PENULIS / PENELITI

Drs. Tri Agus Susanto, MS : Ketua
Drs. Gatot Budiarto, MS : Anggota
Drs. Noer Indones : Anggota
Drs. Widodo : Anggota

E D I T O R

Drs. Eddy Ramlan

Drs. Abu Hanifah

KATA SAMBUTAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SUMATERA SELATAN

Kita telah memaklumi, bahwa kebudayaan yang ada di Indonesia sangat banyak corak dan ragamnya, keaneka ragam itu merupakan satu kesatuan yang utuh dalam wadah kebudayaan Nasional, sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yang menjelma dalam nilai-nilai luhur Pancasila.

Untuk melestarikan warisan nilai-nilai budaya luhur bangsa kita, maka perlu adanya usaha pembinaan dan pemeliharaan secara berkesinambungan.

Usaha yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional melalui Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Selatan, dengan cara melakukan dokumentasi, perekaman, penelitian, penulisan, dan pencetakan naskah hasil penelitian. Kegiatan itu merupakan langkah yang tepat dalam rangka menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia.

Saya menyambut dengan gembira dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan diterbitkannya buku yang berjudul :

1. *PENGERAJIN TRADISIONAL DAERAH SUMATERA SELATAN*
(Hasil Penelitian Tahun 1989/1990)
2. *PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT
KOTA PALEMBANG*
(Hasil Penelitian Tahun 1992/1993)

Buku ini merupakan suatu langkah awal dan masih dalam pencatatan yang masih perlu disempurnakan pada masa yang akan datang. Diharapkan dengan terbitnya buku-buku ini akan dapat memberikan sumbangan yang berarti sebagai dasar penelitian lebih lanjut dan untuk melengkapi koleksi perpustakaan.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian kegiatan ini.

Palembang, September 1993

Kepala Kantor Wilayah,

Drs. H. S. WELLI SOETANTO
NIP. 130. 161. 983

**KATA SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Dengan segala rasa senang hati, saya menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian *Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sumatera Selatan*, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun demikian dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami Kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, September 1993

Direktur Jenderal Kebudayaan

PROF. DR. EDI SEDYAWATI
NIP. 130 202 962

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR PETA	vi
DAFTAR GAMBAR / FOTO	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah	2
C. Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	3
E. Metologi	4
F. Hasil	5
BAB II. GAMBARAN UMUM KOTA DAN DAERAH PENELITIAN	6
A. Gambaran Umum Kota Palembang	6
B. Gambaran Umum Daerah Penelitian	10
C. Berbagai Permasalahan Kota	14
BAB III. DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN	
KELURAHAN 26 Ilir	26
A. Disiplin Dalam Penanganan Limbah Keluarga/sampah	27
B. Disiplin Dalam Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Sosial	31
C. Disiplin Terhadap Administrasi Pemerintahan	34
D. Disiplin Dalam Hubungan Keluarga	37

BAB IV. DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN	
TEMPAT-TEMPAT UMUM DI KELURAHAN 26 Ilir	38
A. Disiplin di Lingkungan Pasar/Perkotaan Palembang ...	39
B. Disiplin di Lingkungan Terminal Kota Palembang	42
C. Disiplin di Lingkungan Tempat Hiburan	47
D. Disiplin di Jalan Raya Kota Palembang	51
BAB V. UPAYA PEMBINAAN DISIPLIN PADA MASYARAKAT	
KOTA PALEMBANG	58
A. Pembinaan oleh Pemerintah	61
B. Pembinaan oleh Tokoh Masyarakat	65
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN :	
1. Daftar Informan	71
2. Peta	74

DAFTAR PETA

	Halaman
PETA KOTA PALEMBANG	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Cara Membuang Sampah Dengan Kantong Plastik	30
Gambar 2 : Tempat Penampungan Sampah Sementara di Daerah Pemukiman	30
Gambar 3 : Penambahan Petak di Pasar Bagi Pedagang	41
Gambar 4 : Terminal Bayangan di Persimpangan Jalan	45
Gambar 5 : Jembatan Penyebrangan di Jalan Utama	57
Gambar 6 : Pengadilan Bagi Penglanggar Ketertiban	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II. 1. Keadaan Tanah dan Drainase di Kotomadia Palembang	16
Tabel II. 2. Luas Daerah Kotamadia Palembang berdasarkan Kecamatan Tahun 1990	17
Tabel II. 3. Pembagian Wilayah Administratif di Kotamadia Palembang Tahun 1990	17
Tabel II. 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan	18
Tabel II. 5. Jumlah Angkatan Kerja di Kotamadia Palembang Tahun 1990	18
Tabel II. 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dipeluknya	19
Tabel II. 7. Fasilitas Beribadah di Kotamadia Palembang	19
Tabel II. 8. Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kotamadia Palembang Berdasarkan Kecamatan	20
Tabel II. 9. Perguruan Tinggi yang ada di Kotamadia Palembang	20
Tabel II.10. Gangguan Kamtibmas di Kotamadia Palembang Tahun 1989 - 1990	21
Tabel II.11. Jenis Perkara yang Diselesaikan di Kejaksaan Negeri Tahun 1990	21

Tabel II. 12.	Jumlah Terdakwa yang Diajukan dan Mendapat Keputusan Pengadilan Negeri Palembang 1990	21
Tabel II. 13.	Jumlah Tertuduh yang Memperoleh Keputusan Pengadilan Berdasarkan Jenis Keputusan	22
Tabel II. 14.	Jumlah Tambahan Narapidana Menurut Jenis Kejahatan.	22
Tabel II. 15.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	23
Tabel II. 16.	Jumlah Penduduk Kecamatan Ilir Barat I Berdasarkan Kelurahan	23
Tabel II. 17.	Jumlah Penduduk Kecamatan Ilir Barat I Berdasarkan Matapencaharian	24
Tabel II. 18.	Jumlah Penduduk Kelurahan 26 Ilir Tahun 1991	24
Tabel II. 19.	Jumlah Penduduk Kelurahan 26 Ilir Berdasarkan Pemeluk Agama Tahun 1991	25
Tabel II. 20.	Penduduk Kelurahan 26 Ilir Berdasarkan Matapencaharian	25
Tabel III. 1.	Pemilikan KTP di Kodia Palembang Tahun 1992	36
Tabel IV 1.	Terminal Bus dan Taxi di Kotamadia Palembang	42
Tabel IV. 2.	Jumlah Armada dan Jurusan Bus Kota di Palembang	43
Tabel IV. 3.	Rute Taxi/Oplet di Palembang	46
Tabel IV. 4.	Panjang Jalan Menurut Fungsinya	47
Tabel IV. 5.	Gedung Bioskop di Palembang	48
Tabel IV. 6.	Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Palembang	53
Tabel IV. 7.	Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya Kota Palembang	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai makhluk sosial manusia akan selalu hidup berkelompok. Melalui kerjasama dalam kelompoknya itulah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Betapapun ukuran dari pengelompokan sosial tersebut diperlukan sebuah organisasi sebagai wadah pemersatunya. Ada empat hal utama yang terdapat di dalam sebuah pengelompokan masyarakat, yaitu pemilikan sosial, sarana penghubung, kaidah-kaidah sosial (Budhisantoso, 1990)

Kota sebagai satuan wilayah pemukiman pada hakekatnya adalah merupakan salah satu tempat dimana manusia mengadakan pengelompokan sosial. Kota biasanya ditandai dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan heterogenitas masyarakat yang tinggi. Pertumbuhan penduduk di kota sangat dipengaruhi oleh derasnya arus urbanisasi dari daerah belakang dan sekitarnya yang terjadi secara kontinyu. Kota sebagai pusat pelayanan dengan berbagai fasilitasnya itulah yang antara lain menjadi daya tarik utama penduduk pendatang dari daerah belakang dan sekitarnya.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kurangnya prasarana dan sarana kehidupan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan di daerah perkotaan. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi di kota besar di Indonesia antara lain adalah masalah pencemaran lingkungan sebagai akibat pengolahan limbah yang kurang benar, masalah transportasi, masalah kesempatan kerja, masalah pemukiman yang kurang memenuhi persyaratan hidup, dan berbagai masalah sosial kemasyarakatan seperti kriminalitas dan masalah tunasusila. Ketatnya persaingan masyarakat untuk mendapatkan prasarana dan sarana kehidupan, tidak jarang orang memperhatikan orang lain demi untuk pemenuhan kebutuhan pribadinya. Sehubungan dengan hal ini, kurangnya

pemahaman sejumlah warga kota terhadap lingkungan dimana mereka tinggal.

Munculnya permasalahan di daerah perkotaan tersebut antara lain sangat dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan warga kota dalam mentaati segala peraturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Seperti telah tersirat di atas bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki aturan-aturan, kaidah sosial, dan pengendalian sosial tertentu untuk menjaga keberlangsungan kelompoknya itu. Demikian pula halnya dengan kelompok masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Sehubungan dengan itu pula untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat perlu adanya pembinaan disiplin terhadap warga masyarakat yang bersangkutan.

Begitu pentingnya pembinaan disiplin di kalangan masyarakat sehingga terungkap pula dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurut GBHN, pembinaan Disiplin Nasional, menanamkan sikap tenggang rasa, hemat dan prasojo, bekerja keras, cermat, tertip, penuh rasa pengabdian, jujur, dan mandiri karena amanat inilah penelitian tentang Pembinaan Disiplin di Lingkungan Masyarakat Kota Palembang dilakukan.

B. MASALAH

Dalam kehidupan sehari-hari berbagai permasalahan muncul di perkotaan. Perpaduan antara kurang memadainya prasarana dan sarana kehidupan, dan kurangnya pemahaman warga kota terhadap aturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku di perkotaan diduga menyebabkan kekurangan disiplin warga masyarakatnya. Sehubungan dengan hal ini, pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sejauh mana tingkat disiplin warga masyarakat di lingkungan perkotaan.
2. Aturan dan kaidah-kaidah sosial apa saja yang berlaku pada lingkungan masyarakat perkotaan.
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam rangka pembinaan disiplin pada masyarakat perkotaan.

C. TUJUAN

Berkenan dengan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mendiskripsikan tingkat disiplin warga masyarakat di kota Palembang. Sebagai acuan sampai sejauh mana tingkat disiplin warga masyarakat,

dalam kajian ini akan diungkapkan pula aturan-aturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku di kalangan masyarakat perkotaan. Upaya pembinaan disiplin yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam masalah ini dapat digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana warga masyarakat telah mematuhi berbagai aturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Karena itu pengungkapannya juga merupakan tujuan dari penelitian ini.

Data dan informasi tentang pembinaan disiplin di lingkungan masyarakat kota sangatlah penting artinya bagi perumusan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh terhadap warga di daerah perkotaan. Hal ini penting artinya mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang muncul di daerah perkotaan sejalan dengan berkembangnya kota itu sendiri. Asumsi dalam penelitian ini adalah semakin pada penduduk suatu lingkungan pemukiman semakin rendah tingkat disiplin warga masyarakat.

D. RUANG LINGKUP

Penelitian tentang Pembinaan Disiplin di lingkungan masyarakat kota dilakukan pada dua lokasi tempat berlangsungnya aktivitas masyarakat yaitu (1) di lingkungan pemukiman (2) di tempat-tempat umum. Dengan data dan informasi yang dikumpulkandi kedua lokasi tersebut diharapkan dapat mencerminkan permasalahan kedisiplinan yang terdapat di kota Palembang. Kedua lokasi lingkungan tersebut merupakan daerah pusat kota, dimana diperkirakan terdapat berbagai permasalahan yang disebabkan karena kurangnya disiplin warga masyarakat. Daerah yang merupakan pusat kota dengan penduduk yang ada di kota Palembang secara purposive dipilih Kecamatan Ilir Barat I. Kecamatan ini wilayahnya sebagian besar termasuk dalam pusat kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Yang dimaksud dengan tempat-tempat umum dalam penelitian ini adalah pusat perbelanjaan (pasar dan pertokoan), lingkungan terminal, lingkungan tempat hiburan, dan lingkungan jalan raya. data dan informasi yang diungkap di lingkungan pemukiman antara lain adalah disiplin warga masyarakat terhadap penanganan limbah keluarga, kebersihan lingkungan, partisipasi warga masyarakat terhadap kegiatan sosial, administrasi pemerintahan dan hubungan dalam ketetangaan. Sementara itu pada lingkungan tempat-tempat umum (pasar dan pertokoan, terminal, tempat-tempat hiburan dan jalan raya) data dan informasi yang diungkap adalah disiplin terhadap kebersihan, aturan-aturan dalam pelayanan, aturan-aturan di tempat umum, dan disiplin terhadap peraturan-peraturan formal.

E. METOLOGI

Agar pembahasan dapat menjangkau satu kesatuan yang utuh, maka lingkungan pemukiman yang diambil sebagai obyek penelitian merupakan satu kesatuan yang utuh pula. Penentuan daerah penelitian dilakukan secara bertahap. Tahap pertama memilih satu lingkungan administratif kecamatan dengan kriteria (1) penduduk padat (2) berada di pusat kota dan (3) mobilitas dan aktivitas penduduk tinggi. Berdasarkan kriteria ini maka Kecamatan Ilir Barat I. Secara purposive dipilih sebagai sampel lingkungan administratif Kecamatan.

Tahap kedua, dari kecamatan yang dipilih sebagai sample dipilih lokasi penelitian, yaitu lingkungan pemukiman dan lingkungan tempat-tempat umum. Dimana penelitian ini dapat berada dalam lingkungan satu Kelurahan, Kecamatan atau bilamana tidak memungkinkan dalam lingkungan kota Palembang. Kriteria untuk menentukan lokasi penelitian dalam tingkat Kelurahan ini adalah (1) kepadatan penduduk yang tinggi (2) mobilitas dan aktivitas penduduk cukup tinggi dan (3) relatif berada di pusat kota. Berdasarkan kriteria ini maka secara purposive ditentukan Kelurahan 26 Ilir sebagai daerah lokasi penelitian.

Untuk lokasi penelitian daerah pemukiman diambil 3 rukun tetangga (RT) yang mempunyai sifat sebagai pemukiman kondominium (rumah susun), perkampungan kelas sosial menengah dan pemukiman dalam bentuk perkampungan kelas sosial bawah.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara kepustakaan, wawancara, dan pengamatan. Teknik kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data-data sekunder di berbagai Instansi pemerintah maupun swasta. Data sekunder ini untuk mengungkapkan tentang lokasi, kependudukan dan berbagai kasus pelanggaran disiplin dan berbagai peraturan yang umumnya bersifat formal. wawancara ditunjukan terhadap sumber-sumber data primer. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan pedoman wawancara. Pengamatan dimaksudkan untuk memperoleh relevansi antara hasil wawancara dengan kenyataan yang sebenarnya, disamping untuk memperoleh gambaran lapangan. Pengetahuan tentang aturan-aturan dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku pada masyarakat, digunakan untuk mengukur tingkat disiplin warga masyarakat di lingkungan yang bersangkutan.

F. HASIL

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebuah naskah yang berisi tentang disiplin masyarakat kota Palembang dan upaya pembinaan yang telah dilakukannya. Deskripsi tentang disiplin warga kota ini penting artinya bagi pembinaan disiplin Nasional dalam rangka pembinaan Kebudayaan Nasional.

B A B II

GAMBARAN DAERAH PENELITIAN

Pada Bagian ini akan digambarkan tiga hal pokok yaitu (1) gambaran umum kota (2) gambaran umum daerah penelitian dan (3) berbagai permasalahan kota.

A. GAMBARAN UMUM KOTA

1. Sejarah dan keadaan Daerah

Palembang merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Sumatera Selatan yang sekaligus merupakan Ibukota Propinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang didirikan pada tanggal 5 Ashada tahun 605 Caka bersamaan dengan bulan Juni tahun 683 oleh DAPUNTA HYANG. Palembang merupakan Ibu negeri Kedatuan Sriwijaya (Swama Dwipa) dan dimasa Kesultanan Palembang dikenal pula dengan nama Palembang Darulsalam. Palembang sebagai kota air dikenal dengan nama Negeri Batang Hari Sembilan dan Kota Musi.

Nama Palembang berasal dari kata Limbang yang merupakan pekerjaan membersihkan atau memisahkan logam emas dari lumpur. Pekerjaan ini dulunya banyak dilakukan oleh penduduk Palembang, terutama disekitar Muara Ogan Kertapati, yang mana di tempat itu diberi nama Palimbang yang kemudian berubah menjadi Palembang. Berdasarkan sejarah kota Palembang, Kota Palembang termasuk salah satu kota tua di Indonesia.

Secara administratif, kota Palembang sekarang ini dikepalai oleh walikotamadya dan termasuk dalam wewenang pembantu Gubernur wilayah Palembang yang meliputi daerah Tingkat II Kotamadya Palembang, MUBA, OKI dan OKU. Disamping itu Palembang termasuk salah satu wilayah pembangunan

di Propinsi Sumatera Selatan diantara 6 daerah wilayah pembangunan. Wilayah pembangunan Palembang berpusat di Palembang dengan wilayahnya meliputi Daerah Tingkat II Kotamadya Palembang, Ogan Komering Ilir, Sebagian Daerah Tingkat II Musi Banyu Asin dan sebagian Daerah Tingkat II Muara-Enim. Pusat-pusat sekunder pengembangan wilayah adalah kota Kayu Agung dan Prabumulih dimana wilayah ini merupakan wilayah pengembangan industri dan juga sebagai daerah penghasil beras, karet, ikan, buah-buah dan palawija.

Palembang terletak diantara 1,5 sampai 2 LS dan 101 sampai dengan 105 BT dengan ketinggian rata-rata 5 m di atas permukaan laut. Kota Palembang masih terpengaruh oleh pasang surutnya laut, yaitu dengan melalui sungai-sungai yang ada atau melintas di kota Palembang, khususnya sungai yang besar seperti Musi, Ogan dan lain sebagainya. Jarak Palembang dengan selat Bangka kurang lebih 105 Km. Palembang merupakan daerah tropis dengan angin lembab nisbi, suhu cukup panas yaitu antara 22 - 32 derajat celcius dengan curah hujan yang terbanyak dibulan Maret yaitu 428 mm dan paling sedikit di bulan Juli dengan curah hujan 22 mm.

Keadaan tanah di Palembang berlapis alluvial, liat dan berpasir terletak pada lapisan yang masih muda, banyak mengandung minyak bumi, yang juga dikenal dengan Lembang Palembang - Jambi. Tanahnya relatif datar, tempat-tempat yang sedikit tinggi dibagian utara kota, sebagian dari tanah Palembang selalu digenangi air baik diwaktu atau sesudah hujan yang terus menerus. Daerah kota Palembang yang tidak pernah tergenang air meliputi luas 10.009,44Ha atau sekitar 47,75% dari seluruh luas daerah. Sedangkan yang tergenang terus menerus meliputi 37,36%. Hal ini dapat dimengerti karena Palembang merupakan daerah yang relatif rendah dan terpengaruh oleh pasang surutnya laut (tabel II. 1). Luas Daerah Kotamadia Palembang berdasarkan Buku Palembang dalam angka 1990 adalah 495,47 Km persegi dengan daerah yang terluas adalah Kecamatan Ilir barat, yaitu 75 Km persegi dan daerah terkecil Ilir Timur I (lihat tabel II.2).

Secara administratif batas kotamadia Palembang berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1988. Sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Dengan Desa Pangkalan Benteng, Desa Gasing dan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa MUBA.
- b. Sebelah Selatan : Dengan Desa Bakung, Kecamatan Inderalaya Kabupaten OKI dan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

- c. Sebelah Timur : Dengan Balai Makmur Kecamatan Banyuasin I Kabupate MUBA.
- d. Sebelah Barat : dengan Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten MUBA.

2. Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tanggal 6 Desember 1988 tentang perubahan batas wilayah kotamadia Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir maka Kotamadia Palembang mendapat 9 desa dari Kecamatan Kelapa dan 1 desa dari kecamatan Inderalaya OKI. Sembilan desa dari Kecamatan Talang Kelapa dibagi dalam dua Kecamatan yaitu kecamatan Sukarami dengan lima desa dan Kecamatan Sako dengan empat desa. Sedangkan satu desa dari Kecamatan Inderalaya dimasukkan kedalam kecamatan Seberang Ulu I. Dengan demikian Kecamatan dikotamadia Palembang sekarang ini terdiri dari 8 wilayah kecamatan dan 72 kelurahan dan desa (lihat tabel II.3).

Pemerintah Kotamadia Daerah Tingkat II Palembang sekarang ini terdiri dari 12 Dinas. Dinas - dinas dimaksud adalah :

1. Dinas Pekerjaan Umum
2. Dinas Tata Kota
3. Dinas Kebersihan dan Keindahan
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Dinas Pemadam Kebakaran
7. Dinas Pertanian
8. Dinas Peternakan
9. Dinas Pasar
10. Dinas Sosial
11. Dinas Pendapatan Daerah
12. Dinas Perikanan

Disamping Dinas-dinas ini terdapat sejumlah kantor dan instansi lainnya yang melaksanakan otonomi pemerintahan tingkat II serta sejumlah instansi vertikal.

3. Kependudukan

Gambaran tentang penduduk di Kotamadia Daerah Tingkat II Palembang

secara kualitatif berasal dari berbagai suku bangsa dan daerah. Sebagai ibukota Propinsi, kota Palembang menjadi tujuan penduduk dari berbagai daerah. Penduduk asli Palembang adalah " Wong Palembang " dengan kebudayaan Palembang. Sekarang ini wong Palembang berdasarkan pengamatan kuantitatif jumlahnya tidak merupakan mayoritas. Data-data kependudukan yang berkaitan dengan etnisitas dalam statistik tidak ditemukan. Data-data kependudukan yang ada hanya terbatas pada data kependudukan yang sifatnya katagoris.

Jumlah Penduduk Kotamadia Palembang berdasarkan Palembang dalam Angka 1990 sejumlah 1.144.279 jiwa dengan 215.000 rumah tangga. Penduduk yang terbesar ada di kecamatan Ilir Timur I dan yang terkecil ada pada kecamatan Sako. Jumlah penduduk di Kecamatan Ilir Barat I sejumlah 143.038 jiwa yang merupakan daerah terpadat kedua dan berada di pusat kota (lihat tabel II.4). Kepadatan penduduk di Kecamatan Ilir Timur I adalah 11.426/Km dan Kecamatan Ilir Barat I, 7.152/Km. Persebaran penduduk yang tidak merata ini antara lain menyebabkan timbulnya permasalahan sosial ekonomi. Penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan kelompok umur dibawah 25 tahun sebagai proporsi yang dominan (lihat tabel II.5).

Jumlah angkatan kerja di Kotamadia Palembang berkecendrungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Proporsi angkatan kerja laki-laki ternyata jauh lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Jumlah angkatan kerja pada tahun 1991 sejumlah 310.000 jiwa atau sekitar 20% dari total jumlah penduduk (lihat tabel II.6).

Penduduk yang memeluk agama Islam merupakan proporsi yang terbesar, disusul pemeluk agama Budha, Katholik, Protestan dan Hindu (lihat tabel II.7). Jumlah sarana beribadah menunjukkan kecendrungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dengan jumlah yang terbanyak ada pada Langgar dan Mesjid. Kecamatan Ilir Timur II menunjukkan jumlah mesjid dan langgar yang paling banyak. Sedangkan untuk kelenteng yang paling banyak terdapat di Kecamatan Ilir Barat I (lihat tabel II.8).

4. Pendidikan

Sarana pendidikan SD yang ada di Kotamadia Palembang menunjukkan Kecamatan Ilir Timur II yang paling banyak dan kecamatan Sako yang paling kecil, demikian halnya untuk SLTP. Sedangkan untuk SLTA proporsi yang terbesar terdapat di Kecamatan Ilir Timur I (lihat tabel II.9). Pendidikan Tinggi yang terdapat di Kotamadia Palembang meliputi 2 Perguruan Tinggi Negeri ,

yaitu UNSRI dan IAIN Raden Fatah. Sedangkan Perguruan Tinggi Swasta ada 8 Universitas/Sekolah Tinggi dan 8 Akademi (lihat tabel II.10).

Data-data tingkat pendidikan penduduk kotamadia Palembang ternyata tidak ada di Palembang dalam Angka, demikian halnya di Statistik Daerah Tingkat I. Meskipun demikian secara kualitatif diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan penduduk sebagian besar berpendidikan relatif rendah.

5. Gangguan Kamtibmas

Polda Sumbagsel termasuk wilayah yang tingkat kriminalitasnya termasuk paling tinggi di Indonesia. Barometer Kamtibmas Polda Sumbagsel adalah kota Palembang. penganiayaan berat menunjukkan frekwensi yang paling besar dibandingkan dengan jenis kriminalitas lainnya , disusul dengan jenis kriminalitasnya lainnya di kota Palembang, disusul dengan penipuan dan penganiayaan ringan. Frekwensi kriminalitas jenis penganiayaan termasuk yang tertinggi untuk kota-kota di Indonesia. Bentuk-bentuk penganiayaan yang paling banyak dilakukan dengan senjata tajam (lihat tabel II.11)

Data-data di Kejaksaan Negeri menunjukkan bahwa jumlah perkara yang banyak ditangani sebagian besar berupa perkara dengan pemeriksaan cepat, dan jenis perkara ini sangat menonjol pada tahun 1988. Jenis perkara lain yang cukup dominan adalah perkara pelanggaran KUHP dimana jenis perkara ini berkecendrungan semangkit meningkat dari tahun ke tahun (lihat tabel II.12). Penduduk laki-laki merupakan proporsi yang sangat besar untuk melakukan tindak kriminalitas dengan umur 21 tahun ke atas yang paling dominan. (lihat tabel II. 13).

Data dari Pengadilan Negeri Palembang jumlah tertuduh yang diajukan ke pengadilan sebagian besar keputusan yang dijatuhkan adalah pidana penjara disusul pidana kurungan (lihat tabel II.14). Narapidana yang paling banyak adalah laki-laki dengan jenis kejahatan yang paling banyak dilakukan adalah pencurian (lihat tabel II. 15).

B. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Daerah peneltian studi ini secara purposive adalah Kecamatan Ilir Barat I. Kecamatan Ilir Barat I sebagian wilayahnya termasuk pusat kota Palembang dengan tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi, nomor dua setelah Ilir Timur I. Di kecamatan ini terdapat gedung-gedung pusat

Pemerintah Daerah Tingkat I pada khususnya dan Daerah Tingkat II Kotamadia Palembang pada umumnya. Kecamatan Ilir Barat I sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ilir Timur I, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat II, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ilir Timur I dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Musi Banyu Asin.

Luas wilayah kecamatan ini adalah 3.629 Ha yang terdiri dari tanah pasang surut 350 Ha, tanah kering 2.153 Ha, tanah basah 200 Ha, tanah belukar 200 Ha dan tanah untuk keperluan fasilitas umum 26 Ha. Sebagian besar tanah yang ada diperuntukkan sebagai bangunan, baik bangunan perumahan maupun perkantoran. Dalam Periode-periode tertentu sebagian tanah basah terkena limpahan air pasang sekitar sebulan setiap tahunnya.

Penduduk Kecamatan Ilir Barat I sangat heterogen dalam etnisitas, pekerjaan dan pendidikannya. Hal ini terjadi antara lain bahwa di kecamatan ini merupakan pusat fasilitas pendidikan di kota Palembang. Jumlah Perguruan Tinggi yang terdapat di daerah ini sebagian besar berkumpul di kecamatan ini, seperti antara lain Unsri, Unpal, Akprin, Tridinanti. Berdasarkan data kependudukan tahun 1991, jumlah penduduk di Kecamatan Ilir Barat I sejumlah 140.312 jiwa. Penduduk dengan kelompok umur 25 tahun menunjukkan proporsi yang sangat besar yang pada dasarnya termasuk usia muda (lihat tabel II. 16).

Jumlah Kelurahan yang ada di Kecamatan ini ada 9 Kelurahan, dimana Kelurahan Lorok Pakjo merupakan Kelurahan yang terpadat penduduknya, yang meliputi 27 % dari penduduk Kecamatan. tetapi Kelurahan ini relatif tidak berada di pusat kota. Kelurahan dengan jumlah penduduk terkecil adalah kelurahan 22 Ilir yang meliputi 3 % dari penduduk kecamatan. Untuk lengkapnya, penduduk berdasarkan kelurahan lihat tabel II. 17.

Mata pencaharian penduduk ternyata yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri dan ABRI, pedagang dan buruh menunjukkan proporsi yang relatif seimbang dengan buruh yang terbesar proporsinya (31%). Yang bermata pencaharian sebagai petani menunjukkan proporsi 1%. Petani disini pada umumnya petani rawa yang masih ada dipinggiran kota (lihat tabel II. 18).

Kelurahan yang terpilih secara purposive sebagai sampel penelitian adalah Kelurahan 26 Ilir, Wilayah ini berada di pusat pemerintahan dan pusat perdagangan yang mempunyai potensi besar untuk berkembang dengan cepat dimasa-masa yang akan datang. Wilayah Kelurahan ini secara administratif merupakan wilayah pemerintahan, perdagangan, pemukiman dan sekaligus pendidikan.

Struktur Pemerintahan Kelurahan 26 Ilir terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan, 5 Kaur, 28 RW dan 65 Rt. Pejabat-pejabat di Kelurahan ini khususnya Lurah, Sekretaris dan Kaur merupakan pejabat yang diangkat oleh Pemda Kotamadia Palembang dan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Sedangkan untuk RW dan RT dilakukan dengan sistem pemilihan oleh warganya dan yang nantinya di buatkan SK nya oleh Walikotamadia. Disamping itu terdapat LKMD yang merupakan organisasi struktural yang membantu Kepala Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya. Anggota LKMD ini terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat.

Batas wilayah Kelurahan 26 Ilir meliputi sebelah barat dengan Kelurahan 25 Ilir, sebelah timur dengan Kelurahan 22 Ilir, sebelah utara dengan Kelurahan 24 Ilir dan sebelah selatan dengan Kelurahan 29 Ilir. Luas wilayah Kelurahan ini adalah 4,5 Km yang tanahnya berupa dataran. Sebagian besar wilayah ini berupa perumahan/pekarangan sekitar 448,75 Ha, Empang sekitar 1 Ha dan kuburan sekitar 0,25 Ha.

Jumlah penduduk Kelurahan 26 Ilir sejumlah 22.551 jiwa yang terdiri dari 4.372 KK. Jumlah penduduk yang berumur kurang dari 25 tahun merupakan proporsi yang sangat besar yaitu 14.311 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, yaitu terdapat 11.035 laki-laki dan 11.516 perempuan (lihat tabel II.19). Penduduk berdasarkan agama, sebagian besar beragama Islam, dan frekuensi yang relatif merata untuk pemeluk agama Protestan, Katholik dan Budha (lihat tabel II. 20). Sarana beribadah adalah 11 langgar, 3 mesjid, 2 gereja dan 1 vihara.

Mata pencaharian penduduk paling besar adalah Pegawai Negeri termasuk ABRI. Sedangkan mata pencaharian lainnya seperti pedagang dan buruh juga mempunyai proporsi yang besar. Mata pencaharian lainnya seperti swasta/jasa mempunyai proporsi yang relatif kecil (lihat tabel II. 21).

Di Kelurahan 26 Ilir terdapat 4 hotel dan 1.300 rumah sewaan dengan berbagai tipe dan jenis. wilayah Kelurahan ini dilalui salah satu jalan protokol yang menuju ke pusat perkantoran Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dengan sejumlah jalan kolektor yang menuju ke pusat pertokoan dan pemukiman. Diseberang kiri kanan jalan protokol ini terdapat sejumlah perkantoran Pemerintahan maupun swasta serta pertokoan. Sebagian besar wilayah yang ada untuk bangunan dan sebagian kecil untuk empang/kambang dan perkuburan. Penduduk di kelurahan sebenarnya diperkirakan mempunyai tingkat mobilitas penduduk yang sangat tinggi khususnya yang berkaitan dengan keluar masuknya penduduk ke wilayah kelurahan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di kelurahan ini terdapat kompleks rumah susun dan dekat dengan pusat

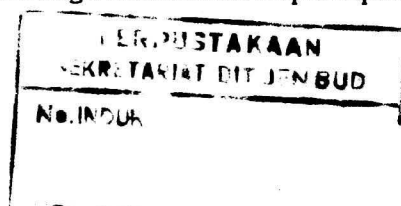
pemerintahan, pendidikan dan perdagangan. Dalam kenyataannya, registrasi penduduk yang berkaitan dengan keluar masuknya penduduk menunjukkan angka yang sangat meragukan (sangat kecil). Terdapat dua kemungkinan yang menyebabkannya yaitu pencatatan yang kurang rapi dan atau tidak melapornya penduduk yang datang dan pergi ke RT/Kelurahan.

Pemukiman di wilayah kelurahan ini pada dasarnya dapat dibedakan tiga jenis, yaitu pemukiman yang sifatnya merupakan kondominium dalam hal ini adalah rumah susun, pemukiman, dan kompleks. Pemukiman yang berupa kondominium sebagian besar berupa rumah susun. Rumah susun yang termasuk dalam Kelurahan ini terdapat 6 RT. Pemukiman yang berupa perkampungan relatif menyebar keseluruh wilayah. Kualitas bangunan perkampungan sangat bervariasi, artinya ada yang berupa bangunan permanen dan sekaligus ada yang berupa bangunan yang tidak permanen yang bercampur dalam satu RT. Sebagian besar pemukiman Kelurahan ini berupa perkampungan. Pemukiman yang berupa kompleks merupakan pemukiman pejabat atau bekas pejabat yang terdapat di sekitar Talang Semut.

Di Kelurahan ini terdapat 65 RT dan yang terpilih sebagai sampel purposive ada tiga RT yaitu RT 3 (rumah susun) RT 49 dan RT 50. Gambaran RT 3 (rumah susun) semuanya merupakan tipe rumah ukuran kecil (Tipe 18). Dalam blok ini belum semuanya dihuni dan bukan semuanya merupakan pemilik. Menurut informasi dari Ketua RT masih terdapat 6 pintu yang belum ada penghuni. Penghuni RT ini sebagian besar adalah bekas korban kebakaran di 26 Ilir yang sekarang ini dibangun rumah susun ini. Sebagian lagi merupakan pendatang yang melakukan sewa beli, sebagian yang menyewa dari pemilik. Tidak terdapat data yang pasti tentang bagaimana status kepenghunian rumah susun yang ada di RT ini.

Gambaran pemukiman RT ini berdasarkan pengamatan lapangan berkecenderungan untuk berkembang menjadi pemukiman kumuh. Jemuran yang bergantung secara tidak beraturan, suasana yang selalu ramai dengan anak-anak yang bermain, keadaan fasilitas rumah yang berkecenderungan kurang perawatan dan lingkungan kebersihan rumah yang kurang terawat. Berdasarkan pengamatan, rumah susun ini berkecenderungan dihuni oleh keluarga yang jumlah anggota keluarganya relatif banyak. Justru jarang ditemui keluarga kecil yang menghuni rumah susun. Dalam kondisi yang demikian inilah suasana rumah susun yang "selalu sibuk" selalu dijumpai setiap saat.

Dalam aspek pengelolaan kebersihan rumah susun masih dilakukan oleh Perum Perumnas, dimana warga rumah susun berpartisipasi dalam membungkus



sampah dirumahnya masing-masing dan ditaruh di lantai bawah pada tempat yang telah disediakan. Lingkungan blok rumah susun menunjukkan sampah-sampah kering yang berserakan dengan rumput yang "terlambat dipangkas"

Mata pencaharian penduduk bervariasi seperti pegawai negeri, pedagang, karyawan dan buruh. Tidak terdapat data yang jelas tentang jumlah penduduk berdasarkan pekerjaannya. Menurut Ketua RT 3 jumlah yang banyak adalah sebagai pekerja swasta. Swasta yang dimaksudkan disini antara lain karyawan, pedagang atau pekerjaan yang tidak pada pemerintah.

RT 49 dan 50 merupakan perkampungan yang padat dengan variasi kondisi perumahannya yang berbeda-beda. Gambaran RT ini menunjukkan bahwa jalan-jalan di perkampungan sudah diperkeras dengan bantuan pembangunan desa. Jalan yang ada berupa jalan lorong dan gang. Lorong diperkeras dengan aspal yang hanya dapat dilalui kendaraan roda empat searah, dan dapat dua arah untuk mobil ukuran kecil. Gang-gang yang ada diperkeras dengan beton, dan dalam jarak tertentu diberi penghalang untuk menghindari motor untuk berjalan cepat.

Perumahan yang ada disepanjang lorong menunjukkan kualitas bangunan yang lebih baik dibandingkan dengan perumahan yang masuk ke gang-gang. Tidak terdapat ruang yang relatif kosong diantara rumah. Ruang yang relatif kosong pada umumnya ada pada halaman rumah penduduk yang tertentu saja. Diantara lorong dan gang yang ada, sebagian besar tidak ada selokannya. Sehingga pada waktu hujan, air mengalir di jalan atau gang dan melimpah ke pekarangan penduduk dan mengalir ke tempat yang rendah.

Mata pencaharian penduduk kedua RT ini sebagian besar adalah pegawai Negeri, dan sebagian lagi sebagai buruh. Tidak terdapat dominasi etnis di kedua RT ini, artinya penduduk yang ada merupakan percampuran dari banyak etnis. Letak Rt ini sangat strategis sekali untuk sampai pada pusat kota, baik ke pusat pemerintahan, pusat pertokoan, tempat hiburan dan fasilitas olahraga. Pemukiman ini dikelilingi pusat-pusat fasilitas seperti diatas, meskipun tempat fasilitas tadi ada juga yang tidak termasuk dalam kelurahan 26 Ilir.

C. BERBAGAI PERMASALAHAN KOTA PALEMBANG

Permasalahan yang sekarang ini merupakan permasalahan yang dianggap mempunyai prioritas tinggi untuk segera diatasi berfokus pada upaya untuk merealisasikan Palembang Bari. Obsesi Palembang Bari antara lain termanifestasikan pada upaya mengejar Adipura, sebagai bentuk penghargaan

sebagai kota besar yang bersih dan rapi di Indonesia. Diakui juga bahwa terdapat sejumlah permasalahan lain di luar obsesi di atas yang sebenarnya menuntut untuk segera di atasi. Permasalahan yang termasuk prioritas untuk segera diatasi adalah :

1. MASALAH KETERTIBAN MASYARAKAT

Masalah ketertiban masyarakat dianggap sebagai masalah yang penting untuk segera di atasi. Anggapan bahwa timbulnya ketidak tertiban selama ini bersumber pada perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Masalah ketertiban masyarakat ini dianggap masih rendah, seperti antara lain ketidak tertiban pedagang kaki lima yang tidak pada tempatnya, ketidak tertiban bangunan-bangunan yang menyumbat sungai, selokan, ketidak tertiban dalam berlalu lintas dan ketidak tertiban dalam menjaga kebersihan.

Ketidak tertiban ini muncul, antara lain berkaitan dengan ketidak konsistensian penerapan peraturan yang ada, disamping lemahnya kontrol sosial dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang ada. Seperti misalnya ketidak tertiban pedagang kaki lima yang berdagang pada tempat yang tidak pada tempatnya, sebenarnya mereka dulunya diperbolehkan oleh petugas dan bukti legalisasinya antara lain ditariknya retribusi bagi pedagang ini. Demikian halnya dengan ketidak tertiban bangunan, antara lain berkaitan dengan belum jelasnya alokasi lahan dan lemahnya pengawasan peraturan yang ada.

2. MASALAH PENYEDIAAN PRASARANA.

Masalah disiplin dan ketertiban tidak dapat tumbuh bilamana tidak didukung dengan prasarana dan sarana yang memungkinkan disiplin dan ketertiban dapat tumbuh. Untuk angkutan kota, selama ini belum ada terminal yang representatif untuk angkutan kota, baik untuk bus kota maupun otolet/taxi. Terminal-terminal yang sekarang ini sebagian besar masih merupakan tempat persinggahan sebagai tempat perputaran batas akhir rute kendaraan umum. Sehingga yang namanya terminal pada akhirnya merupakan tempat mangkalnya kendaraan angkutan umum di suatu tempat. Terminal otolet/taxi di samping kantor walikotamadya misalnya, adalah menggunakan pinggir kiri jalan sebagai terminal. Disepanjang rute jalan muncul sejumlah terminal-terminal bayangan untuk menjaring penumpang yang pindah rute. Perpindahan penumpang yang

rute kendaraan umum sekarang ini sangat kesulitan, yang disebabkan terbarnya terminal angkutan kota di beberapa tempat. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan salah satu faktor semerawutnya angkutan kota di Palembang.

3. PERMASALAHAN FASILITAS UMUM

Fasilitas umum yang ada di kota Palembang dapat dikatakan tertinggal dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Sejumlah fasilitas umum yang ada seperti tempat hiburan, taman-taman kota, pertokoan dan lain sebagainya masih terbatas dalam jumlah dan kualitasnya. Memang dalam hal ini tidak sepenuhnya Pemerintah daerah mampu menyediakan tanpa kerjasama dengan swasta. Minimnya fasilitas umum inilah yang antara lain secara psikologis berkecenderungan menumpuknya warga kota pada fasilitas-fasilitas umum yang ada, sehingga salah satu diantaranya sebagai sumber ketidaktertiban masyarakat di tempat-tempat hiburan.

4. PERMASALAHAN KONDISI LAHAN

Kondisi lahan kota Palembang sebagian besar berupa tanah rendah dan berawa. Kontur lahan yang tingginya sekitar 5 m dari permukaan laut menyebabkan masih terpengaruh pasang surutnya laut dengan melalui sungai-sungai yang ada di kota Palembang. Di lain pihak konstruksi arsitektur bangunan kota tidak sepenuhnya menyadari akan kondisi lahan yang demikian ini. Sehingga penimbunan lahan untuk tujuan pembangunan sering kali justru menjadi sumber tergenangnya daerah yang sebelumnya tidak pernah banjir.

TABEL II.1

KEADAAN TANAH DAN DRAINASE DI KOTAMADIA PALEMBANG

	Keadaan Tanah	Luas (Ha)	Persentase
1.	Tidak tergenang air	10.009,44	47,75
2.	Tergenang sehari sesudah hujan	444,31	2,12
3.	Tergenang dipengaruhi Pasang Surut	308,08	1,47
4.	Tergenang Musiman	2.366,14	11,29
5.	Tergenang Terus	7.829,83	37,36

Sumber : Palembang Dalam Angka 1990

TABEL II.2
LUAS DAERAH KOTAMADIA PALEMBANG
MENURUT KECAMATAN TAHUN 1990

No.	KECAMATAN	Luas (Km)
1.	Ilir Timur	15,5
2.	Ilir Timur II	53,5
3.	Ilir Barat I	20,5
4.	Ilir Barat II	75,0
5.	Seberang Ulu I	60,0
6.	Seberang Ulu II	24,0
7.	Sukarami	63,3
8.	S a k o	42,5
<i>JUMLAH</i>		353,80

Sumber : Palembang Dalam Angka 1990

Keterangan : Luas wilayah sebelum pemekaran Tahun 1987 = 224 Km.

TABEL II.3
PEMBAGIAN WILAYAH ADMISTRATIF DI KOTAMADIA PALEMBANG
TAHUN 1990

No.	KECAMATAN	Jumlah Kel.	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Ilir Timur	12	92	390
2.	Ilir Timur II	11	135	437
3.	Ilir Barat I	9	106	352
4.	Ilir Barat II	10	27	250
5.	Seberang Ulu I	12	97	539
6.	Seberang Ulu II	9	97	405
7.	Sukarami	5	114	255
8.	S a k o	4	54	164
<i>JUMLAH</i>		72	722	2.792

Sumber : Palembang Dalam Angka 1990

TABEL II.4
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KECAMATAN

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah RT
1.	Iilir Timur	180.226	32.688
2.	Iilir Timur II	237418	43.472
3.	Iilir Barat I	143.038	27.772
4.	Iilir Barat II	98.043	19.174
5.	Seberang Ulu I	196.328	37.447
6.	Seberang Ulu II	147.810	27.501
7.	Sukarami	90.247	17.283
8.	S a k o	50.247	9.663
9.	Tunawisma/Awak Kapal	232	-
<i>JUMLAH</i>		1.144.279	215.000

Sumber : Palembang Dalam Angka 1990

TABEL II.5
ANGKATAN KERJA DI KOTAMADIA PALEMBANG
TAHUN 1987 - 1991

No.	T a h u n	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1.	1987	218.100	60.100	278.200
2.	1988	244.600	63.300	287.900
3.	1989	230.900	63.000	293.900
4.	1990	237.500	64.500	302.000
5.	1991	244.600	66.000	310.600

Sumber : Palembang Dalam Angka 1990

TABEL II.6
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA
TAHUN 1987 - 1991

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	978.875
2.	Katholik	34.305
3.	Protestan	28.440
4.	Budha	44.532
5.	Hindu	4.141

Sumber : Palembang Dalam Angka 1990

TABEL II.7
JUMLAH RUMAH IBADAH DI KODIA PALEMBANG
TAHUN 1990

No.	Kecamatan	Islam	Katolik	Hindu	Budha
1.	Ilir Timur I	146	16	4	3
2.	Ilir Timur II	235	8	2	10
3.	Ilir Barat I	126	6	-	14
4.	Ilir Barat II	157	2	-	3
5.	Seberang Ulu I	178	4	-	7
6.	Seberang Ulu II	161	2	-	3
7.	Sukarami	87	3	-	11
8.	S a k o	23	3	-	-

Sumber : Palembang Dalam Angka 1990

TABEL II.8
JUMLAH FASILITAS PENDIDIKAN DI KOTAMADIA PALEMBANG
BERDASARKAN KECAMATAN

No.	KECAMATAN	JUMLAH SEKOLAH		
		Negeri	Swasta	MI
1.	Ilir Timur I	87	22	10
2.	Ilir Timur II	117	23	19
3.	Ilir Barat I	90	8	7
4.	Ilir Barat II	58	3	13
5.	Seberang Ulu I	136	9	20
6.	Seberang Ulu II	64	17	-
7.	Sukarami	54	2	-
8.	S a k o	30	1	1

Sumber : Palembang Dalam Angka 1990

TABEL II.9
PERGURUAN TINGGI YANG ADA DI KOTAMADIA PALEMBANG

No.	Perguruan Tinggi	Status	Jumlah Mahasiswa
1.	UN SRI	Negeri	9.754
2.	IAIN	Negeri	4.451
3.	Univ. Muhammadiyah	Swasta	1.372
4.	Univ. Tridinanti	Swasta	4.884
5.	Univ. Sjakhyakirti	Swasta	566
6.	Univ. Palembang	Swasta	1.203
7.	STKIP Palembang	Swasta	2.003
8.	Univ. IBA	Swasta	1.242
9.	STISPOL	Swasta	805
10.	Univ. Taman Siswa	Swasta	448
11.	Akademi Perbanas	Swasta	987
12.	Akuntansi Sjakhyakirti	Swasta	130
13.	ABA Methodist	Swasta	387
14.	APRIN	Swasta	324
15.	ASM Sriwijaya	Swasta	352
16.	AMKOP		638
17.	AMIK	Swasta	387

Sumber : Palembang Dalam Angka 1990

TABEL II.10
GANGGUAN KAMTIBMAS DI KOTAMADIA PALEMBANG
TAHUN 1989 - 1990

No.	JENIS GANGGUAN	1989	1990
1.	Perburuan	-	36
2.	Kebakaran	26	8
3.	Pencurian Ringan	567	434
4.	Penodongan	216	280
5.	Penjambretan	195	144
6.	Perampokan	17	11
7.	Penggelapan	193	152
8.	Penipuan	357	334
9.	Penganiayaan Berat	720	171
10	Penganiayaan Ringan	306	281
11	Pemeriksaan	47	44

Sumber : Palembang Dalam Angka 1990

TABEL II.11
JENIS PERKARA YANG DISELESAIKAN DI KEJAKSAAN NEGERI
TAHUN 1990

No.	JENIS PERKARA	JUMLAH
1.	K U H P	3.042
2.	Senjata Api dan Peledak	4
3.	Narkotika	14
4.	Lain-lain Pemeriksaan Cepat	25.102

Sumber : Palembang Dalam Angka 1990 Dengan Penyesuai seperlunya.

TABEL II.12
JUMLAH TERDAKWA YANG DIAJUKAN DAN MENDAPAT
KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG 1990

No.	U M U R	JUMLAH
1.	Kurang 16 Tahun	107
2.	16 - 21 Tahun	435
3.	Lebih 21 Tahun	563
4.	Lain - lain	24

Sumber : Palembang Dalam Angka 1990 Dengan Penyesuai seperlunya.

TABEL II.13
JUMLAH TERDAKWA YANG DIAJUKAN DAN TELAH MENDAPAT
KEPUTUSAN DARI PENGADILAN NEGERI
KODIA PALEMBANG TAHUN 1990

No.	JENIS KEPUTUSAN	JUMLAH
1.	Pidana Penjara	970
2.	Pidana Kurungan	70
3.	Pidana Denda	1
4.	Diserahkan Kepada Orang Tua	1
5.	Dibebaskan dari Tuduhan	5

*Sumber : Palembang Dalam Angka 1990
 Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang*

TABEL II.14
JUMLAH TAMBAHAN NARAPIDANA MENURUT
JENIS KEJAHATAN

No.	Jenis Kejahatan	Jumlah
1.	Ketertiban Umum	136
2.	Pembakaran	6
3.	Kesusilaan	21
4.	Perjudian	42
5.	Penculikan	24
6.	Pembunuhan	28
7.	Penganiayaan	148
8.	Pencurian	944
9.	Pemerasan	101
10.	Penggelapan	41
11.	Penipuan	33
12.	Penadahan	92
13.	Lain - lain	261

Sumber : Palembang Dalam Angka 1990

TABEL II.15
PENDUDUK KECAMATAN ILIR BARAT I BERDASARKAN UMUR
TAHUN 1991

No.	U M U R	JUMLAH
1.	0 - 24	77.003
2.	25 - 44	48.817
3.	45 - 69	22.761
4.	> 70	1.436
JUMLAH		143.038

*Sumber : Monografi Kecamatan Ilir Barat I 1991
 dengan Penyesuaian seperlunya.*

TABEL II.16
PENYEBARAN PENDUDUK BERDASARKAN KELURAHAN

No.	Kelurahan	Jumlah	Persentase
1.	19 Ilir	4.267	3.42
2.	22 Ilir	4.363	2.87
3.	23 Ilir	4.363	3.11
4.	24 Ilir	16.659	11.80
5.	26 Ilir	21.659	15.47
6.	26 Ilir I	6.162	4.40
7.	Lorok Pakjo	37.650	26.89
8.	Siring Agung	14.641	10.02
9.	Bukit Lama	31.312	22.36
J u m l a h		140.312	100.00

Sumber : Monografi Kecamatan 1991

TABEL II.17
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK KECAMATAN ILIR BARAT I
TAHUN 1991

No.	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	%
1.	Pegawai Negeri Sipil	20.189	22
2.	A B R I	1.292	1
3.	Pegawai Swasta / BUMN	12.750	13
4.	Wiraswasta / Jasa	25.050	28
5.	Buruh Harian	27.910	31
6.	Tani	1.082	1
7.	Lain - lain	1.910	2

Sumber : Monografi Kecamatan Ilir Barat I 1991

TABEL II.18
JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN 26 ILIR
TAHUN 1991

No.	U M U R	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	0 - 24	5.704	5.605	10659
2.	25 - 49	3.304	2.955	6.259
3.	> - 50	1.027	953	1.980
	Jumlah	11.035	11.510	22.551

*Sumber : Buku Registrasi Penduduk Kelurahan 1991
diolah seperlunya.*

TABEL II.19
JUMLAH PENDUDUK 26 ILIR
BERDASARKAN AGAMA YANG DIANUTNYA
TAHUN 1991

No.	A G A M A	JUMLAH
1.	Islam	20.165
2.	Protestan	821
3.	Katholik	673
4.	Hindu	814
5.	Budha	76
	Jumlah	22.551

Sumber : Buku Registrasi Penduduk 1991, dengan diolah sepeertunya.

TABEL II.20
JUMLAH MATA PENCAHARIAN PENDUDUK KELURAHAN 26 ILIR
TAHUN 1991

No.	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1.	Pegawai Negeri Sipil	2.701
2.	A B R I	526
3.	Guru	209
4.	Pensiunan	652
5.	Kesehatan	77
6.	Buruh	2.128
7.	Pedagang	2.341

Sumber : Buku Registrasi Penduduk dengan pengolahan sepeertunya.

B A B III

DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN KELURAHAN

Disiplin masyarakat di lingkungan pemukiman berkaitan dengan sejumlah aspek kehidupan, yang pada dasarnya merupakan hasil dari proses - proses sosial diantara individu maupun Kelompok. Pemukiman pada dasarnya merupakan daerah tempat tinggal masyarakat yang teratur. Daerah pemukiman di perkotaan mempunyai bentuk yang bervariasi, seperti perkampungan, kompleks maupun bentuk-bentuk condominium. Ketiga variasi bentuk pemukiman ini dari segi kelas sosialnya mempunyai tingkat heterogenitas yang berbeda-beda. Meskipun demikian ketiganya secara administratif mempunyai persamaan yaitu dikelola oleh RT/RW yang langsung berada dibawah Kelurahan. Pada setiap Rukun Tetangga (RT) terdiri dari 30 - 50 Keluarga. Sedangkan Rukun Warga (RW) terdiri dari 2 - 5 RT. Proses sosial yang berlangsung di lingkungan pemukiman dengan sendirinya tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan lingkungan pemukiman dengan aspek-aspek kehidupan sosial dan aspek-aspek kehidupan administratif pemerintahan.

Keterkaitan lingkungan pemukiman di perkotaan dengan dua hal di atas tidak dapat dilepaskan dari kaidah-kaidah normatif yang ada pada masing-masing lingkungan pemukiman. Tipe adaptasi perilaku terhadap tujuan budaya dan sarana kelembagaan yang ada di lingkungan pemukiman yang didasarkan pada kaidah-kaidah normatif yang ada, akan memunculkan perilaku yang sifatnya konformis atau bukan konformis. Nuansa perilaku diantara kedua bentuk inilah yang sering dilihat sebagai cermin disiplin masyarakat dalam kehidupan di daerah pemukiman.

Gambaran tentang disiplin masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yang dalam hal ini penggambaran meliputi empat aspek (1) disiplin dalam penanganan limbah keluarga atau sampah (2) disiplin dalam

partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial (3) disiplin terhadap administrasi pemerintahan (4) disiplin dalam hubungan keluarga. Keempat aspek di atas secara berurutan digambarkan dibawah ini.

A. DISIPLIN DALAM PENANGANAN LIMBAH KELUARGA/SAMPAH.

Pengertian limbah keluarga atau sampah yang dihasilkan keluarga sifatnya relatif. Limbah atau sampah sering diartikan sebagai semua jenis barang atau benda yang tidak dimanfaatkan lagi dan perlu untuk dibuang. Demikian halnya dengan limbah atau sampah yang dihasilkan keluarga berkaitan dengan semua jenis barang yang tidak bermafaat dan perlu dibuang. Kalau diperhatikan tingkat kemanfaatan suatu barang pada setiap keluarga adalah berbeda-beda, sehingga suatu barang itu dianggap sampah atau limbah juga berbeda-beda.

Makna bahwa limbah atau sampah itu perlu dibuang ada pada setiap individu, keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Dalam hal bagaimana limbah atau sampah yang dihasilkan keluarga itu dikelola dan bagaimana tingkat kepatuhan pengolahannya, merupakan permasalahan tersendiri yang perlu terus diupayakan peningkatannya. Disiplin dalam penanganan sampah keluarga berkaitan dengan jumlah sampah yang dihasilkan keluarga dan cara menanganinya.

1. Jumlah limbah/sampah yang dihasilkan keluarga.

Limbah atau sampah yang dihasilkan keluarga berlangsung setiap hari, karena aktivitas-aktivitas keluarga berlangsung setiap hari. Setiap keluarga akan menghasilkan limbah atau sampah setiap harinya. Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Keindahan daerah Tingkat II Kodia Palembang tahun 1992, jumlah rumah kediaman yang merupakan sumber penghasil limbah/sampah adalah 122.812 kediaman yang menyebar 192,51 Km² wilayah terbangun. Jumlah limbah/sampah yang dihasilkan setiap harinya dari pemukiman sekitar 2.136 meter kubik. Jumlah ini ternyata 61% dari keseluruhan total sampah yang dihasilkan di wilayah Kodia Palembang. Tidak terdapat data yang pasti berapa jumlah sampah yang dihasilkan pada keluarga-keluarga yang bermukim di perkampungan, kompleks maupun di kondominium. Berdasarkan pengamatan, terdapat kecendrungan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan keluarga dengan tingkat sosial ekonomi yang tinggi, jumlah sampah yang dihasilkannya juga relatif banyak. Dengan kata lain terdapat kecendrungan adanya hubungan yang positif

banyak. Dengan kata lain terdapat kecendrungan adanya hubungan yang positif antara tingkat sosial ekonomi keluarga dengan jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Bilamana hal ini dipakai dasar, maka diperkirakan bahwa pemukiman di kompleks berkecendrungan untuk menghasilkan sampah yang lebih banyak. Meskipun demikian hal lain yang perlu diperhatikan bahwa pemukiman di kompleks pada umumnya jumlah keluarga lebih terbatas dibandingkan dengan di perkampungan maupun di kondominium. Berdasarkan hal ini diperkirakan jumlah sampah yang dihasilkan pemukiman di perkampungan dibandingkan di kompleks akan lebih besar di perkampungan. Dalam makalahnya untuk seminar Apinda DR. Hilda Zulkifli menyebutkan bahwa rata-rata penduduk Kodia Palembang menghasilkan sampah 3 liter setiap harinya dan jumlah ini diproyeksikan akan menjadi 3,7 liter pada tahun 1995.

Data dari Dinas Kebersihan dan Keindahan Kodia Palembang juga menyebutkan bahwa sebagian besar jenis sampah yang dihasilkan adalah berupa jenis sampah organik (79,49%). Demikian halnya dengan jenis sampah yang dihasilkan keluarga, sebagian besar berupa sampah organik.

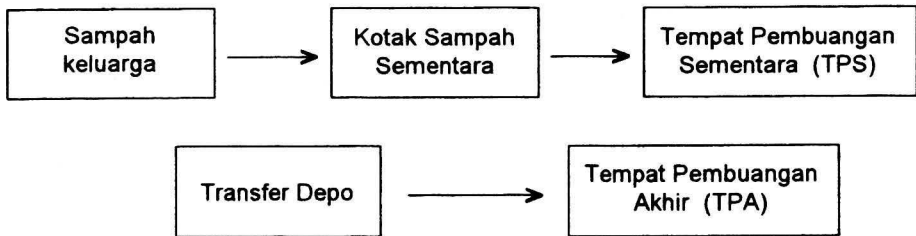
Pada daerah sampel penelitian pemukimannya berupa perkampungan dan rumah susun (kondominium) di kelurahan 26 ilir. Jumlah sampah yang dihasilkan tidak diketahui secara persis. Sebagai gambaran jumlah sampah yang dihasilkan, pada RT 49 yang pemukimannya berupa perkampungan, sampah yang secara efektif dapat dikumpulkan rata-rata 2-3 gerobak sampah setiap harinya dengan gerobak berkapasitas 2 meter kubik. Sedangkan di rumah susun blok 49 (RT 3) jumlah yang dihasilkan setiap harinya 2-3 gerobak sampah. Pengambilan sampah dilakukan rata-rata 2 kali sehari, yaitu pagi hari dan sore hari untuk di RT 49 dan sekali di RT 3

2. Pengelolaan limbah/sampah

Pengelolaan sampah di lingkungan pemukiman (RT) tidak dapat dilepaskan dari peranan Kelurahan. Kalau diperhatikan lebih lanjut, pengelolaan limbah/sampah yang berjalan sekrang ini mempunyai dua sifat pengelolaan yang menjadi satu, yaitu sifat pengelolaan yang dimobilisir dan pengelolaan yang partisipatif. Kedua sifat pengelolaan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu bagaimana limbah atau sampah tidak menumpuk dan segera dapat dibuang ketempat yang telah disediakan. Dalam hal ini ketersediaan sarana-sarana untuk pengelolaan sampah merupakan salah satu hal yang sangat penting.

Sistem pembuangan sampah yang ada di Kodia Palembang dilakukan secara bertingkat sejak dari rumah tangga sampai ke tempat pembuangan akhir. Secara sederhana sistem pembuangan sampah dapat digambarkan sebagai berikut :

SKEMA 1



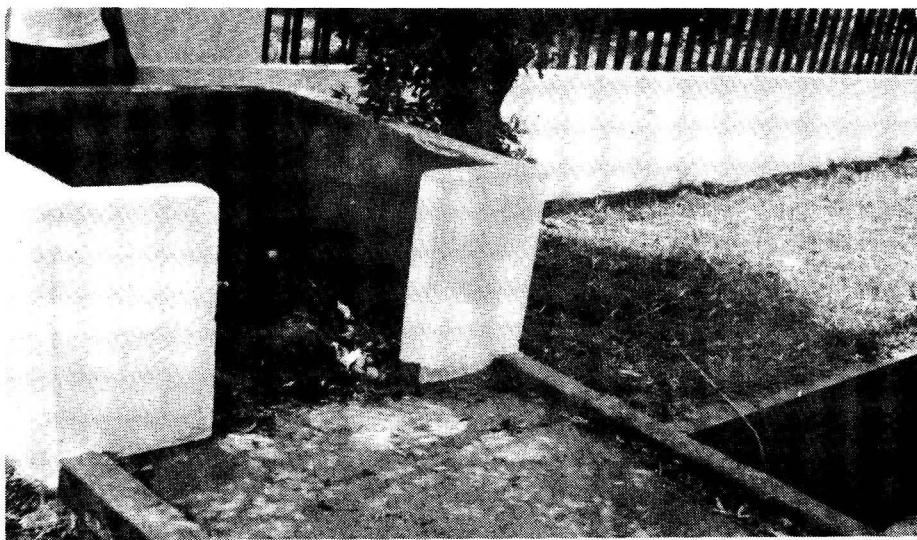
Sarana pembuangan sampah yang secara langsung berkaitan dengan tuntutan partisipasi masyarakat di lingkungan pemukiman meliputi sampah keluarga, kotak sampah sementara dan tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Sedangkan Transfer Depo dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) secara relatif kecil keterkaitannya dengan partisipasi masyarakat.

Penyediaan sarana pembuangan sampah di RT 49 dan 50 yang berupa kotak sampah dan gerobak sampah sampai saat ini sepenuhnya disediakan oleh Kotamadia, yang diserahkan kepada LKMD dan seterusnya LKMD menyerahkan kepada masing-masing RT. Sedangkan pada RT rumah susun (RT 3) menyediakan sarana berupa kotak sampah dan gerobak sampah dilakukan oleh pihak Perumnas. Pengelolannya sepenuhnya masih ditangani oleh Perum Perumnas. Sedangkan untuk tempat pembuangan sementara yang berupa bangunan permanen, di RT 49 dilakukan oleh Kotamadia dan di RT 3 dilakukan oleh Perumnas. Sarana untuk membuang sampah keluarga, dilakukan oleh masing-masing keluarga dengan memasukkan sampah ke dalam kantong-kantong plastik dan menaruhnya di kotak sementara. Kantong-kantong plastik tersebut disediakan sendiri oleh masing-masing keluarga. Cara masyarakat membuang sampah dengan kantong plastik antara lain seperti terlihat dalam gambar 1

Pengambilan sampah dari kotak sementara ke TPS dilakukan dengan menggunakan gerobak sampah. Di RT 49 kegiatan ini dilakukan oleh LKMD dengan cara menunjuk orang untuk melakukan pekerjaan ini. Imbalan yang diberikan kepada petugas ini diambil dari iuran setiap



Cara membuang sampah dengan kantong plastik



Tempat membuang sampah sementara di daerah pemukiman

keluarga sebesar Rp. 1000,- setiap bulannya. Penarikan iuran dilakukan oleh petugas LKMD pada awal bulan. Iuran sejumlah ini disamping untuk memberikan honor kepada petugas juga dipergunakan untuk memperbaiki peralatan yang rusak maupun untuk menambah peralatan yang ada. Kerusakan kotak sampah pada masing-masing keluarga menjadi tanggung jawab keluarga. Sanksi bagi yang tidak membayar iuran berupa sampah yang ada tidak diambil oleh petugas. Berdasarkan wawancara dengan ketua RT dan Lurah 26 Ilir disebutkan bahwa kepatuhan masyarakat dinilai cukup baik. Dalam aspek-aspek tertentu kepatuhan dalam membayar iuran memang tinggi, dilihat dari jaranginya penunggak iuran. Sebaliknya dalam perilaku pembuangan sampah, berdasarkan pengamatan masih dijumpainya orang yang membuang sampah di sungai dan di parit, selokan yang ada tumpukan sampah. TPS di daerah pemukiman ada yang hasil swadaya dan ada pula yang merupakan bantuan pemerintah. Bentuk TPS di daerah pemukiman berupa bak beton dengan pintu yang terbuka (lihat gambar 2).

Pengelolaan sampah di rumah susun masih sepenuhnya ditangani oleh Perum Perumnas. Penghuni rumah susun diminta untuk memasukan sampah keluarga dalam kantong-kantong plastik dan menaruhnya di kotak-kotak sampah untuk selanjutnya diangkut dengan gerobak sampah ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Konsekwensi dari hal ini barangkali menyebabkan kurang pedulinya warga rumah susun terhadap kebersihan lingkungannya. Berdasarkan pengamatan lapangan, diperoleh gambaran bahwa banyak sampah-sampah kering yang berserakan di got, gang maupun taman-taman. Disamping itu terlihat juga rerumputan yang terlalu lama tidak dipangkas. Alasan warga rumah susun bahwa hal ini merupakan tanggung jawab Perum Perumnas yang mengelola rumah susun.

B. DISIPLIN DALAM PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN SOSIAL

Kegiatan sosial dapat dipandang sebagai manifestasi bentuk-bentuk proses sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Manifestasi dari kegiatan sosial dalam masyarakat berupa bentuk-bentuk hubungan yang dapat berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Pada dasarnya kegiatan sosial yang berlangsung dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua yaitu kegiatan sosial yang merupakan kepentingan yang sama dan kegiatan sosial yang merupakan manifestasi dari kepentingan bersama.

Kegiatan sosial yang berkaitan dengan sifat kepentingan yang sama lebih banyak berlangsung diantara keluarga dengan keluarga. Kegiatan sosial yang sifatnya sebagai kepentingan yang sama adalah kegiatan-kegiatan sosial dimana masing-masing keluarga mempunyai potensi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial yang sama. Karena kegiatan sosial ini berkaitan dengan masing-masing keluarga dan memerlukan keterlibatan warga dalam kegiatan sosial inilah, maka partisipasi diantara warga sangat menentukan keeratn hubungan sosial masyarakat.

Kegiatan-kegiatan sosial ini antara lain meliputi upacara disekitar life cycle manusia seperti kematian, perkawinan, kelahiran, mendirikan rumah dan lain sebagainya. Kegiatan ini masih tetap berlangsung di daerah penelitian dan dalam tingkat tertentu partisipasi warga dalam kegiatan di atas bervariasi.

Kegiatan sosial yang berkaitan dengan kematian berlangsung saat adanya kematian warga masyarakat dan diteruskan kegiatan 3 sampai 7 hari berikutnya yang diistilahkan sebagai takziah. Untuk kegiatan ini partisipasi masyarakat sangat besar, karena adanya suatu anggapan bahwa hukumnya wajib bagi tetangga untuk membantu tetangga yang mengalami kesusahan. Sebagai ungkapannya diwujudkan dengan ikut menyatakan dukacita dengan membawa sesuatu barang bagi para wanita, sedangkan bagi laki-laki diungkapkan dengan datang ke rumah yang meninggal pada saat setelah meninggal sampai waktu dikuburkan.

kegiatan takziah diselenggarakan dengan memberitahukan secara lisan kepada pelayat bahwa akan diselenggarakan kegiatan ini selama 3 atau 7 hari yang bertujuan mendoakan yang meninggal. Berdasarkan hal ini maka tetangga diharapkan dapat menghadirinya. partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua. Bilamana takziah ini berkaitan dengan orang yang disegani maupun dihormati, ada kecendrungan yang datang banyak. Sebaliknya bilamana takziah ini berkaitan dengan orang yang kurang disegani atau dihormati kecendrungan yang hadir terbatas. Meskipun demikian belum pernah terjadi kegiatan takziah ini tidak dihadiri warga masyarakat samasekali.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan disekitar kelahiran berlangsung pada saat persiapan akan melahirkan (di RS) dan pada saat diselenggarakannya upacara pemberian nama (upacara cukuran). Partisipasi masyarakat/tetangga untuk menjujuk di RS menunjukkan kecendrungan yang terbatas/kecil. Yang melakukan kegiatan ini pada umumnya adalah tetangga yang mempunyai hubungan sosial yang akrab maupun yang masih mempunyai hubungan famili.

Sedangkan partisipasi masyarakat dalam menghadiri upacara cukuran didasarkan pada tatacara pemberitahuan secara resmi dari yang menyelenggarakan baik secara lisan maupun tertulis. Dalam aturan spoan santun bermasyarakat, hanya yang diundang yang diharapkan untuk menghadiri upacara ini, sedangkan yang tidak menerima undangan tidak akan hadir. Penyelenggaraan upacara ini pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari tetangga dekat untuk membantu persiapan dan pelaksanaan upacara. tetangga dekat pada umumnya akan melibatkan diri dalam persiapan kegiatan ini. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan-kegiatan disekitar upacara perkawinan. Artinya keterlibatan warga lebih didasarkan pada permintaan formal dari yang menyelenggarakan untuk menghadiri resepsi perkawinan. Sedangkan tetangga dekat keterlibatannya lebih dalam lagi yaitu berkaitan dengan persiapan dan penyelenggaraan upacara perkawinan maupun resepsinya

Partisipasi warga dalam kegiatan sosial mendirikan rumah menunjukkan kecendrungan yang sangat terbatas sekali. Gotong royong dalam mendirikan rumah sudah tidak ada lagi dalam masyarakat kota. Bagi masyarakat kota, mendirikan rumah atau merehabilitasi rumah tempat tinggal dilakukan dengan cara diborongkan atau diupahkan. Keterlibatan tetangga atau warga terbatas pada upacara sedekah atau selamatan dengan akan ditempatinya rumah. Prinsip dasar keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini berdasarkan pemberitahuan secara formal.

Partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan sosial sifatnya sebagai kepentingan bersama menunjukkan kecendrungan yang bervariasi pada masing-masing kegiatan sosial. Yang dimaksud dengan kepentingan bersama di sini adalah kegiatan sosial di mana seluruh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan. Karena kegiatan ini berkaitan dengan kepentingan bersama dari masyarakat, diharapkan masyarakat terlibat dalam kegiatan sosial ini. Bentuk-bentuk dari kegiatan sosial ini antara lain berupa gotong royong, arisan, kegiatan-kegiatan pengajian, kegiatan-kegiatan organisasi sosial dan lain sebagainya.

Kegiatan sosial yang bersifat kepentingan bersama ini secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kegiatan sosial yang sifatnya insidental dan yang sifatnya terjadwal. Kegiatan yang insidental dilakukan oleh warga masyarakat dalam waktu-waktu yang tertentu. Kegiatan gotong royong di RT 49 maupun di RT 3 pada umumnya dilakukan secara insidental. Gotong royong membersihkan selokan di pinggir jalan, mengeraskan jalan, membersihkan tempat ibadat merupakan bentuk-bentuk kegiatan sosial ini. Untuk di RT 3 gotong royong

terbatas pada membersihkan semak-semak dipinggir lorong. Gotong royong yang sifatnya fisik dapat dikatakan terbatas sekali. Yang terjadi adalah berupa iuran dalam bentuk uang.

Partisipasi dengan cara ini yang banyak terjadi dilingkungan pemukiman seperti kegiatan kebersihan dan keamanan. Sehingga yang ada adalah iuran untuk kegiatan kebersihan dan keamanan. Ada semacam sanksi yang memaksa warga masyarakat mau berpartisipasi dengan cara ini yaitu berupa paksaan secara tidak langsung.

Partisipasi dalam kegiatan sosial yang dilakukan dengan terjadwal, pada umumnya dilakukan oleh semacam kelompok sosial atau organisasi. Dalam hal ini partisipasi yang muncul dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi yang muncul dari bawah atas dasar kesadaran sendiri dan partisipasi yang muncul atas dasar instruksi dari atas dalam rangka suatu program tertentu.

Partisipasi ibu-ibu dalam pengajian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pengajian di RT 49 dilakukan secara terjadwal pada setiap hari Kamis. Tidak semua ibu-ibu/wanita berpartisipasi dalam kegiatan ini, tetapi terdapat sekelompok ibu yang memang aktif mengikutinya. Kegiatan arisan yang dilakukan oleh ibu-ibu di RT 49 ada sekitar 4 kelompok yang semuanya tumbuh dari bawah dengan jumlah uang arisannya bervariasi antara Rp. 5.000 s/d Rp. 25.000,- Sebagian besar ibu mengikuti kegiatan ini.

Kegiatan sosial yang sifatnya instruktif bermunculan di RT 49 dan RT 3. Kegiatan ini melibatkan aparat-aparat birokrasi dalam melibatkan masyarakat. Kegiatan PKK, Posyandu, Kelompencapir serta kegiatan yang dilakukan organisasi semacam ini muncul di pemukiman ini. Kegiatan ini menunjukkan ketergantungannya terhadap istri lurah dan isteri RT. Di RT 49 PKK dan Posyandu yang lebih menentukan ternyata ibu RT. Partisipasi ibu-ibu menunjukkan tingkat yang cukup berdasarkan kenyataan bahwa tidak semua ibu maupun balita sepenuhnya berpartisipasi secara aktif sebaliknya juga tidak pernah terjadi kasus kegiatan yang ada tidak didatangi warga masyarakat.

C. DISIPLIN TERHADAP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Disiplin terhadap administrasi Pemerintahan menunjukkan keterkaitan antara masyarakat dengan aspek-aspek pengelolaan pemerintahan. Artinya bagaimana warga masyarakat mentaati aturan-aturan formal dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Dalam kondisi yang demikian ini disiplin masyarakat berkaitan dengan sarana serta pengelola administrasi pemerintahan.

Salah satu aspek disiplin masyarakat dalam bermukim di suatu daerah adalah dimilikinya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pengelolaan KTP ini dilakukan dari tingkat RT, Kelurahan dan Kecamatan. KTP sebenarnya merupakan keharusan untuk dimiliki oleh setiap penduduk yang dewasa. Gambaran dari pemilikan KTP oleh penduduk di Kodia Palembang dan Kecamatan Ilir Barat I adalah sebagai dalam tabel III. 1. Secara umum disiplin masyarakat kota tentang kewajibannya untuk mempunyai identitas dapat dikatakan masih kurang. Barangkali hal ini berkaitan dengan banyak hal antara lain bahwa identitas diri ternyata dapat menggunakan beberapa tanda selain KTP seperti SIM, Kartu Pegawai, Kartu Anggota suatu organisasi dan lain sebagainya. Selain itu juga berkaitan dengan kenyataan belum tertibnya administrasi kependudukan dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan diri terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah kependudukan.

Untuk yang pertama dapat dilihat dari kenyataan bahwa buku-buku registrasi penduduk, kelahiran, kematian di tingkat RT dan Kelurahan tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Faktor lain yaitu berkaitan dengan tidak melaporkannya penduduk yang melakukan mutasi, kelahiran maupun kematian, sehingga RT atau pihak Kelurahan tidak dapat mencatatnya. Bukti-bukti ini dapat dilihat disekitar RT 49 dan RT 3 dan juga RT-RT di Kelurahan Bukit Lama yang pemukimannya sarat dengan tempat kost pelajar, mahasiswa maupun karyawan. Dalam kenyataannya jumlah penduduk yang mutasi ternyata sangat jauh lebih kecil dari kenyataan yang ada. Dalam Triwulan II tahun 1992 jumlah penduduk yang datang di Kelurahan Ilir Barat I sejumlah 214 orang. Sedang pada saat yang bersamaan, Unsri menerima jumlah mahasiswa sekitar 2.600 orang yang sebagian besar berasal dari luar Palembang, belum Sekolah dan Universitas lainnya. Laporan kependudukan dari Kelurahan seharusnya setiap bulan dan monografi tingkat kecamatan diperbaiki setiap 6 bulan. Dalam kenyataannya data-data di Kelurahan maupun dikecamatan masih menggunakan 1 atau 2 tahun yang lewat.

Dalam hal kepatuhan masyarakat untuk mengurus izin mengadakan keramaian umum menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Salah satu faktor utama disini adalah intensifnya pengawasan yang dilakukan terhadap keramaian yang diselenggarakan di Kelurahan 26 ilir.

Disiplin masyarakat dalam melaporkan peristiwa-peristiwa yang dipandang dapat mengganggu ketertaman maupun peristiwa-peristiwa kriminal menunjukkan variasi yang menarik. Peristiwa-peristiwa yang berlangsung di tingkat RT pada umumnya dilaporkan kepada Ketua RT. Peristiwa kriminal

misalnya, bilamana skala atau kerugian relatif kecil pada umumnya diminta untuk tidak diteruskan ke Kepolisian, dengan alasan utama takut nantinya justru membuat "repot" . Dengan demikian untuk jenis peristiwa yang demikian ini sebagian besar tidak terekam dalam data-data di tingkat kelurahan maupun kepolisian.

Tabel III. 1
PEMILIKAN KTP DI KODIA PALEMBANG 1992

No.	DAERAH	Penduduk Yang Wajib KTP	Penduduk Yang Mempunyai KTP	%
1	Kodia Palembang	620.808	398.6341	64
2	Kec. Ilir Barat I	73.986	55.426	65
3	Kel. 26 Ilir	-	-	-
4	RT. 49	-	-	-
5	RT. 3	-	-	-
6	RT. 50	-	-	-

Sumber : Diolah dari data sekunder

Kepatuhan masyarakat dalam mengurus tentang izin bangunan, izin usaha, mematuhi tempat-tempat terlarang menunjukkan kepatuhan yang masih rendah. Menurut informasi dari Kabag Pemerintahan Umum masih banyak bangunan atau usaha yang tidak dilengkapi dengan surat izin. Pengawasan yang dilakukan terhadap pelanggaran, karena keterbatasan sarana yang ada, lebih difokuskan pada tempat atau bangunan yang berada di jalur-jalur utama. Pelanggaran yang ditemui terhadap terpenuhinya dua izin ini adalah dilakukannya pembongkaran.

D. DISIPLIN DALAM HUBUNGAN KELUARGA

Disiplin dalam hubungan keluarga berkaitan dengan proses-proses sosial yang sifatnya assosiatif dalam bidang kerjasama yang mempunyai tujuan yang sama. Dalam masyarakat yang bermukim di rumah susun proses sosial yang sifatnya assosiatif yang terjadi antar keluarga lebih didasarkan pada aspek-aspek formal. Sosiabilitas antar keluarga yang berlangsung secara informal, pada umumnya terjadi pada keluarga-keluarga yang masih mempunyai hubungan keluarga. Meskipun tidak dapat pula dipungkiri bahwa diantara keluarga di rumah susun juga terjadi hubungan-hubungan informal yang kebanyakan berlangsung di luar rumah. Disiplin dalam hubungan antar keluarga di rumah susun (RT 3) memerlukan tingkat tenggang rasa yang besar. Hal ini salah satu diantaranya berkaitan dengan jarak fisik antar bangunan yang sangat dekat, sehingga aktivitas fisik suatu keluarga mempunyai kemungkinan besar dapat mengganggu keluarga yang lain. Pertengkaran antar tetangga yang bersumber pada ketidakmauan untuk saling tenggang rasa sering dijumpai. Sumber utamanya pertengkaran ini seperti bunyi-bunyian radio yang keras, tape recorder yang keras, cara membuang sampah, tetangga yang berisik dan lain sebagainya.

Indikator utama untuk melihat disiplin antar hubungan keluarga ini adalah munculnya sejumlah konflik yang berlangsung antar keluarga. Berdasarkan informasi tokoh masyarakat di pemukiman ini, yang namanya pertengkaran antar ibu-ibu khususnya dapat dikatakan sebagai suatu hal yang sering terjadi. Sebab pertengkaran bermacam-macam, yang semuanya bersumber untuk adanya tenggang rasa diantar keluarga.

Disiplin antar hubungan keluarga di perkampungan menunjukkan determinan kelas sosial ekonomi sebagai kendala utama. Pluralistiknya penghuni perkampungan menyebabkan antar hubungan keluarga berlangsung berdasarkan pengelompokan sosial ekonomi keluarga. Disiplin antar hubungan keluarga yang dominan disini dikatakan oleh ketua RT berada pada kemauan untuk hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat diartikan sebagai kemauan untuk bergaul dengan lingkungannya. Dalam kenyataannya pergaulan antar keluarga di dalam lingkungan perkampungan berlangsung antar tetangga yang berbeda disekitar rumah tempat tinggal.

B A B IV

DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN TEMPAT UMUM DI KELURAHAN

Lingkungan tempat umum diartikan sebagai tempat di mana masyarakat umum dapat melakukan suatu aktivitas tertentu secara bersama-sama. Lingkungan tempat umum biasanya berupa fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat banyak. Terdapat sejumlah fasilitas umum yang dibangun Pemerintah yang dimaksudkan masyarakat memperoleh kemudahan- kemudahan dalam melakukan suatu kegiatan.

Fasilitas umum yang terdapat diperkotaan, selain dibangun oleh Pemerintah dapat pula dibangun oleh pihak swasta. Fasilitas-fasilitas umum ini antara lain berupa pasar, terminal, tempat-tempat hiburan, jalan raya dan lain sebagainya. Fasilitas-fasilitas umum ini dikelola oleh suatu instansi atau sejumlah instansi terkait dengan tujuan utama mendayagunakan fasilitas umum semaksimal mungkin serta mengoperasikannya.

Karena siapa saja dapat memanfaatkan fasilitas umum ini maka diharapkan masyarakat yang memanfaatkan mau mentaati tata tertib yang telah dibuat, agar tempat-tempat umum dapat terjaga kebersihannya, ketertibannya, keamanannya. Disiplin masyarakat dalam memanfaatkan tempat-tempat umum sebenarnya tidak semata-mata tergantung dari masyarakat, melainkan juga berkaitan pula dengan aspek-aspek sarana pendukung yang ada dan sistem pengelolanya.

A. DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PASAR

Pasar diartikan sebagai lingkungan tempat umum di mana masyarakat melakukan transaksi jual beli. Terdapat bermacam-macam tipe pasar, seperti pasar tipe A, B, dan C. Tipe pasar yang lain disebut dengan tipe pasar induk, pasar khusus dan pasar lingkungan. Perbedaan yang lain muncul dalam bentuk tipe pasar modern dan pasar tradisional. Tipe-tipe pasar di atas yang tidak ada di kelurahan 26 Ilir adalah pasar Induk dan pasar tipe A. Sedangkan pasar modern muncul dalam bentuk pusat-pusat perbelanjaan. Pasar tradisional muncul dalam bentuk pasar-pasar lingkungan.

Pasar tradisional dalam bentuk pasar lingkungan yang terdapat di kelurahan 26 Ilir antara lain pasar Cinde dan pasar Gubah. Yang dimaksud dengan pasar lingkungan adalah pasar yang menyediakan keperluan sehari-hari bagi suatu lingkungan tempat tinggal. Pengelolaan pasar ini dilakukan langsung oleh Dinas Pasar Kodia Palembang. Pengelolaan sehari-harinya dilaksanakan oleh kepala unit pasar dengan stafnya. Tugas utama dari kepala unit pasar ini adalah menjaga ketertiban dan keamanan, kelancaran retribusi pedagang dan kebersihan pasar. Kepala unit pasar bertanggung jawab kepada Kadis Pasar Kodia Palembang.

Letak Pasar Cinde berada di pusat kota dan sangat strategis dan tidak jauh dari pasar ini ada sejumlah pusat perbelanjaan modern seperti International Plaza, Ilir Barat Permai, J M Supermarket dan lain sebagainya. Jarak sekitar 1 Km terdapat semacam pasar " induk " yaitu pasar 16. Jenis pedagang yang ada di pasar lingkungan (pasar Cinde) meliputi pedagang los, pedagang toko dan pedagang kaki lima, demikian halnya dengan pasar-pasar lingkungan lainnya.

Disiplin masyarakat pedagang yang diharapkan dapat ditaati adalah disiplin yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan. Disiplin dalam membayar retribusi, yang meliputi harian yang jenis adalah (1) retribusi kaki lima (2) retribusi kebersihan (3) retribusi keamanan dan (4) retribusi pasar fajar. Di luar itu masih terdapat retribusi " LKMD". Retribusi lain berupa retribusi sewa los atau petak termasuk lampu.

Penarikan retribusi dilakukan oleh petugas pasar dengan cara mendatangi pedagang dengan menyerahkan tanda bukti retribusi. Dalam sehari penarikan retribusi dilakukan 2 - 3 kali yaitu pada pagi hari (sekitar jam 07 - 08) dan siang hari (sekitar jam 10 -11). Menurut informasi petugas lapangan dan kepala pasar Cinde dan Pasar 16 Ilir untuk pedagang

kaki lima tingkat ketaatan membayar retribusi harian sekitar 50%. Sedangkan pada pedagang tetap tingkat ketaatannya sekitar 90 %. Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan pedagang menurut petugas lapangan yaitu (1) belum laku dagangannya (2) pembeli sepi dan (3) akan dibayar besok.

Dari sisi pedagang, muncul keluhan tentang terdapatnya jenis-jenis retribusi yang harus dibayar setiap harinya. Disamping retribusi resmi, ternyata pedagang juga dikenai " retribusi tidak resmi " yang ditarik oleh oknum-oknum tertentu. Justru retribusi jenis ini yang menurut pedagang sulit untuk dihindarkan, karena sanksi yang diterima sering bersifat mematikan pekerjaan pedagang. Sedangkan sanksi yang diberikan dari petugas pasar menurut pedagang ini dipandang mempunyai toleransi yang besar. Khusus untuk retribusi harian ini menurut petugas pasar, pada umumnya pedagang kaki lima yang retribusi hariannya " lewat " sulit untuk menariknya lagi pada hari berikutnya. Menurut keinginan pedagang kaki lima diharapkan retribusi harian jenisnya tidak banyak dan tidak semua orang dapat menarik retribusi. Menurut anggapan pedagang, bukannya tidak mau membayar retribusi tetapi kadangkala menariknya retribusi waktunya tidak tepat. Pas sudah ada uang untuk membayar retribusi petugas yang menarik belum datang.

Diantara pedagang pribumi dan non pribumi, berdasarkan pengalaman petugas pasar menunjukkan tingkat kepatuhannya lebih tinggi pedagang non pribumi. Memang tingkat kepatuhan tidak bisa dilepaskan dari sistem pengendalian sosial. Kepala Unit Pasar melakukan pengendalian sosial secara bertahap, yaitu tahap tegoran, tahap pemanggilan dan tahap penyegelan petak. Sistem ini relatif efektif untuk pedagang petak, sebaliknya untuk pedagang kaki lima menunjukkan kurang efektif, karena turn over pedagang kaki lima yang relatif cepat.

Disiplin pedagang dalam menjaga kebersihan dapat dilihat dari dua sisi. Bilamana dilihat dari kepatuhan dalam membayar retribusi kebersihan dapat dikatakan bahwa tingkat disiplin pedagang menunjukkan variasi. Untuk pedagang petak/los pada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan pedagang kaki lima. Demikian halnya kesadaran dalam menyediakan sarana kotak sampah pada masing-masing petak pedagang petak menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup tinggi.

Ada kewajiban pedagang untuk menjaga kebersihan tempatnya berdagang. Dalam kondisi yang demikian ini tanggung jawab masing-masing pedagang berbeda-beda tergantung dari jenis dagangannya. Pedagang jenis sayuran, ikan dan daging mempunyai potensi untuk menghasilkan sampah yang lebih banyak dibandingkan dengan jenis pedagang lainnya.

Kewajiban ini ternyata dilaksanakan oleh sebagian besar pedagang. Pengamatan di pasar menunjukkan pembersihan pasar dilakukan oleh petugas pasar sehari rata-rata 3 kali, dengan sekali pembersihan " besar " yang sekaligus mengumpulkan sampah pasar dari kotak-kotak sampah ke tempat depo sampah. Dengan cara ini memang nampak pasar kelihatan bersih.



Gbr. 3 Penambahan Petak-petak di Pasar bagi Pedagang

Kadangkala antara jumlah pedagang dengan lokasi pasar tidak seimbang, artinya kemampuan pasar untuk menampung pedagang sudah maksimal. Di lain pihak terdapat pedagang (khususnya pedagang kecil) yang ingin berjualan. Oleh Pengelola Pasar maka dibuatkan petak-petak sementara disekitar pasar. Petak-petak ini dijumpai pada setiap pasar kota. Kecendrungan bahwa petak ini memberikan kesan kurang disiplin dalam segala hal mudah dijumpai, seperti dalam kebersihan, lalu lintas dan lain sebagainya. Kesan semrawut berkecendrungan nampak pada lokasi ini.

Justru yang terlihat adalah disiplin masyarakat yang datang ke pasar yang relatif masih kurang. Kebiasaan untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan belum banyak dilakukan. Tidak terdapat data yang pasti berapa jumlah pengunjung pasar Cinde setiap harinya. Sebagai gambaran bahwa pasar Cinde merupakan pasar lingkungan yang banyak dikunjungi kelas sosial menengah ke atas.

B. DISIPLIN DI LINGKUNGAN TERMINAL

Terminal merupakan tempat untuk menurun naikkan penumpang dari berbagai jurusan. Logikanya setiap rute kendaraan penumpang umum terdapat terminal. Dan disepanjang rute terdapat sejumlah sub terminal atau halte. Dalam pengertian yang demikian ini, terminal mempunyai istilah yang berbeda-beda. Untuk angkutan darat diistilahkan dengan terminal, angkutan sungai diistilahkan dengan dermaga dan kereta api diistilahkan dengan stasiun.

Terminal angkutan jalan di Kodia Palembang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu terminal untuk angkutan antar kota dan terminal untuk angkutan dalam kota. Terminal ini di Kodia Palembang meliputi 7 (tujuh) terminal yaitu :

TABEL IV. 1
TERMINAL BUS DAN TAXI DI KODIA PALEMBANG

No.	TERMINAL	PERUNTUKAN	KETERANGAN
1.	KM 5	Bus Antar Kota	2 tempat
2.	Ampera	Bus Antar Kota	Dibawah Jembatan
3.	Lemabang	Taxi Dalam Kota	Dihalaman Pasar
4.	Plaju	Bus/Taxi Dalam Kota	
5.	Sako Kenten	Bus/Taxi Dalam Kota	Permanen
6.	Alang - Alang Lebar	Bus Kota	Pinggir Jalan
7.	Kertapati	Bus/Taxi Dalam Kota	Pinggir Jalan

Sumber : Monografi Kantor Terminal Kodia Palembang

Dengan melihat kondisi terminal di Kodia Palembang di mana terminal yang permanen sangat terbatas, maka disiplin masyarakat di terminal juga dipengaruhi oleh kondisi terminal ini. Luas terminal antara lain juga mempengaruhi ketertiban kendaraan yang keluar masuk, maupun parkir di terminal. Kalau dilihat rute angkutan penumpang di dalam kota, terdapat 13 rute angkutan penumpang yang dilayani Bus Kota seperti terlihat dalam tabel berikut :

TABEL IV. 2
JUMLAH ARMADA DAN JURUSAN BUS KOTA DI PALEMBANG

No.	JURUSAN	JUMLAH
1.	Plaju - Talang Betutu	28
2.	Sungai Lais - TM. Lalu Lintas	2
3.	Kerta Pati - Alang-Alang Lebar	7
4.	Prumnas - Alang -Alang Lebar	3
5.	Plaju - Taman lalu Lintas	10
6.	Plaju - Sungai Lais	20
7.	Kertapati - Sako Kenten	5
8.	Prumnas - Alang-Alang Lebar	1
9.	Kerta Pati - Pusri	2
10.	Plaju - Prumnas	21
11.	Kerta Pati - Bukit Besar	3
12.	Kerta Pati - Alang-Alang Lebar	6
13.	Plaju - Bukit Besar	10
J u m l a h		118

Sumber : Cabang Dinas LLAJR Kodia Palembang 1992

Angkutan umum dalam Kota Palembang berdasarkan data di Cabang Dinas LLAJR Kodia Palembang terdiri dari 1503 otobis, 118 Bus kota dan 2618 mobil penumpang otolet (Taxi). Dilain fihak menurut informasi dari Ditlantas Poltabes Palembang, khusus untuk bus kota jumlah yang beroperasi jauh lebih besar dari yang terdaftar. Hal ini terjadi dikarenakan bus kota yang surat izinnya belum keluar telah berani beroperasi.

Dengan Kondisi terminal seperti sekarang ini dan dengan jumlah kendaraan angkutan penumpang dalam kota seperti di atas, maka yang terlihat bahwa suasana terminal pada siang hari khususnya dan pada jam kerja pada umumnya diwarnai dengan penuhnya terminal oleh kendaraan yang antri.

penuhnya terminal oleh kendaraan yang antri. Ruang yang tersedia bagi penumpang sangat terbatas dan yang namanya ruang tunggu tidak ada. Dalam kondisi yang demikian ini ketertiban yang diupayakan oleh masing-masing unit terminal adalah mengusahakan kelancaran arus kendaraan yang keluar masuk terminal, menjaga kebersihan terminal dan mengusahakan keamanan terminal.

Pengelolaan terminal di kota Palembang sekarang ini setidaknya melibatkan tiga instansi yaitu (1) Dinas LLAJR (2) Dinas Dispenda dan (3) Perusahaan Stasiun Bus. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas di terminal meliputi (1) mengatur keluar masuknya kendaraan keterminal (2) memungut retribusi kendaraan dan (3) menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan terminal. Koordinasi ini juga melibatkan instansi lain di luar ketiga instansi di atas, seperti untuk menjaga ketertiban dan keamanan juga melibatkan Camat dimana terminal ada dan kepolisian serta pengemudi.

Disiplin masyarakat dalam memilih kendaraan di terminal menunjukkan kecenderungan yang relatif tinggi, dimana hal ini berkaitan dengan proporsi antara kendaraan yang ada dengan jumlah penumpang yang seimbang. Sebaliknya dalam kondisi jam pulang sekolah dan pulang kantor serta jam berangkat sekolah atau kantor suasana berebut kendaraan diantara penumpang akan selalu nampak. Suasana berebut kendaraan ini setiap harinya rata-rata berlangsung sekitar 1 - 2 jam.

Kebersihan terminal menunjukkan keadaan yang terjaga, hal ini berkaitan dengan selalu dikumandangkannya peringatan untuk menjaga kebersihan yang disampaikan lewat pengeras suara dan dibersihkannya secara teratur oleh petugas sehari-hari rata-rata 2-3 kali. Disamping itu sarana untuk tempat sampah tersedia di terminal yang diusahakan oleh unit terminal maupun oleh Kodia Palembang. Menurut pengamatan, suasana bersih dan indah kurang tercermin dalam terminal lebih disebabkan kualitas bangunan terminal yang belum permanen dan nuansa warna dalam terminal yang kurang cerah serta tiadanya sarana keindahan seperti taman, tamanan hias menyebabkan suasana terminal yang berkecenderungan gersang. Data-data di unit terminal tidak ada yang mencatat tentang kriminalitas yang terjadi di terminal. Meskipun demikian, menurut informasi dari petugas terminal bahwa gangguan keamanan di terminal yang pernah terjadi seperti penjabretan/pencopetan. Kasus saling berebut penumpang yang merupakan sumber perkelahian pernah terjadi. Untuk mengantisipasi hal ini pada masing-masing unit terminal ada petugas kepolisian

Di kota Palembang dikenal istilah terminal bayangan, yaitu tempat mangkal kendaraan angkutan penumpang kota yang terdapat disepanjang rute angkutan kota. Terminal ini pada umumnya berada di lokasi-lokasi tempat dimana penumpang dapat berganti kendaraan ke jurusan lain dengan relatif mudah. Persimpangan jalan merupakan lokasi yang banyak dipakai sebagai terminal bayangan ini. Pengelolaan terminal ini dilakukan secara tidak resmi oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Masyarakat memang mendapat kemudahan dalam perjalanannya, dilain pihak hal ini sebenarnya bertentangan dengan peraturan dimana tidak diperbolehkannya kendaraan penumpang angkutan kota menaik turunkan penumpang disembarang tempat. Rambu-rambu lalu lintas sudah ada, tetapi dalam kenyataannya hal ini masih berlangsung.

Kebiasaan kendaraan angkutan kota untuk antri di depan sekolah pada jam-jam pulang sekolah mudah dijumpai di kota Palembang. Antrean kendaraan ini (taxi) rata-rata mencapai panjang 150 meter disepanjang pinggir jalan. Pada jam-jam ini kesemrawutan mudah dilihat, khususnya pada sekolah yang jumlah muridnya banyak. Dan hal ini diperparah lagi dengan mobil-mobil pribadi yang menjemput anak-anak sekolah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi turn over kendaraan angkutan kota antara lain panjang rute dan kondisi jalan yang ada di kota Palembang. Rute taxi di kota Palembang mempunyai ciri yang spesifik yaitu warna atau cat kendaraanya yang berbeda-beda pada masing-masing rute.



Gambar 4. TERMINAL BAYANGAN DI PERSIMPANGAN JALAN

TABEL IV. 3
RUTE OPELET / TAXI DI PALEMBANG

No.	R U T E	Warna Kendaraan
1.	Ampera - Bukit Besar	Biru
2.	Ampera - Km. 5	Merah
3.	Ampera - Sekip	Kuning
4.	Ampera - Tangga Buntung	Merah Tua
5.	Ampera - Kertapati	Merah Tua
6.	Ampera - Plaju	Kuning Muda
7.	Ampera - Lemabang	Hijau
8.	Ampera - Sungai Lais	Merah Tua
9.	Ampera - TI. Betutu	Ungu
10.	Ampera - Makrayu	Biru Muda
11.	Ampera - Perumnas	Ungu
12.	Ampera - Pakjo	Ungu

Sumber : Cabang Dinas LLAJR Kodia Palembang

Kalau diperhatikan bahwa rute oplet/taxi di Palembang berpusat di Terminal Ampera. Sehingga dapat dibayangkan bagaimana muatan terminal Ampera dengan luas yang terbatas menampung kendaraan dari segala jurusan. Sekarang ini terminal opelet yang berada dibawah jembatan Ampera di sisi ilir telah dihapus dalam rangka normalisasi Jembatan. Konsekwensinya terminal opelet disebar ke dalam beberapa tempat yang sebenarnya berupa "terminal" bayangan yang dilegalisir yang berada di pinggir-pinggir jalan.

Kondisi jalan di kodia Palembang berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu jalan Arteri yaitu jalan-jalan utama sekeling kota yang mendistribusikan lalu lintas dengan kecepatan sedang dari suatu wilayah ke wilayah lain. Kedua jalan kolektor yaitu jalan-jalan yang mengumpulkan dan menerima lalu lintas dari jalan arteri yang fungsinya menghubungkan daerah-daerah tertentu di dalam kota dan ketiga jalan lokal yaitu jalan yang menyalurkan lalu lintas dari jalan-jalan masuk atau menerima. Keadaan ketiga jenis jalan ini adalah sebagai berikut :

TABEL IV. 4
PANJANG JALAN MENURUT FUNGSINYA

No.	JENIS JALAN	PANJANG
1.	Jalan Arteri	51.574 Km
2.	Jalan Kolektor	58.294 Km
3.	Jalan Lokal	152.956 Km
	Jumlah	265.824 Km

Sumber : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kodra Palembang

Pada umumnya jalan yang dilalui angkutan kota ini adalah jalan arteri dan jalan kolektor, sehingga turn overnya akan lebih cepat.

Dalam kondisi sarana angkutan dalam kota yang demikian ini, disiplin masyarakat di terminal menjadi sangat relatif. Kehadiran petugas di terminal maupun terminal-terminal bayangan sangat berpengaruh terhadap munculnya disiplin masyarakat, baik itu awak kendaraan maupun masyarakat yang menaikkannya. Hal ini dapat dibandingkan dengan kondisi di mana petugas tidak ada, kecendrungan bahwa siapa yang berani melanggar dialah yang paling banyak diuntungkan akan mudah dijumpai.

C. DISIPLIN DI LINGKUNGAN TEMPAT HIBURAN

Tempat hiburan pada umumnya diartikan sebagai tempat dimana seseorang mencari hiburan. Pengertian hiburan sendiri sebenarnya cakupannya sangat luas, dan berkaitan dengan suasana hati maupun fikiran yang riang gembira. Tempat hiburan di kota Palembang ada yang buka pada siang hari saja, malam hari atau siang malam. Mencari hiburan barangkali dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Mungkin atas dasar hal inilah diperlukan tempat-tempat hiburan yang sifatnya permanen.

Hiburan dapat berupa pertunjukan kesenian, hiburan alam dan hiburan fisik. Tempat hiburan yang berupa pertunjukan kesenian antara lain dapat berupa gedung bioskop, gedung kesenian, gedung teater dan lain sebagainya. Tempat hiburan yang berupa hiburan alam antara lain dapat berupa taman, hutan wisata dan lain sebagainya. Tempat hiburan yang berupa hiburan fisik seperti lapangan golf, panti pijat, diskotik, gedung bilyard dan lain sebagainya.

Kalau diperhatikan, kebutuhan masyarakat akan hiburan di luar rumah masih terbatas.

Proporsi keluarga yang menyediakan dana untuk mencari hiburan di luar rumah masih sangat kecil (Susanto; 1989). Meskipun demikian tidak berarti tempat hiburan yang ada di kota Palembang kurang peminatnya. Gambaran tentang tempat hiburan yang berupa gedung bioskop di kota Palembang berdasarkan data tahun 1990 adalah sebagai berikut:

TABEL
GEDUNG BIOSKOP DI PALEMBANG

No.	Kecamatan	Tipe A	Tipe B	Tipe C	Tempat Duduk
1.	Ilir Timur I	4	-	-	1.250
2.	Ilir Timur II	-	1	-	654
3.	Ilir Barat I	4	3	1	2.790
4.	Ilir Barat II	-	1	-	550
5.	Seb. Ulu I	-	1	2	2.000
6.	Seb. Ulu II	-	1	-	650
J u m l a h		8	7	3	7.894

Sumber : Palembang Dalam Angka 1990

Kalau diperhatikan, konsentrasi gedung bioskop terdapat di pusat kota dalam hal ini di kecamatan Ilir Barat I. Tempat hiburan ini bertada di pusat-pusat perdagangan/pertokoan modern untuk gedung bioskop tipe A. Sedangkan gedung bioskop yang bertipe B dan C pada umumnya berupa bangunan yang terpisah. Pangsa pasar gedung bioskop tipe A adalah kelas menengah ke atas, tipe B untuk kelas menengah ke bawah dan tipe C untuk kelas sosial masyarakat bawah.

Informasi dari pengelola gedung bioskop Garuda yang termasuk dalam tipe B dan Pengamatan terhadap penonton di gedung ini dan gedung bioskop lainnya dapat diperoleh gambaran bahwa disiplin masyarakat di tempat gedung bioskop dapat dipilahkan menjadi dua, yaitu disiplin masyarakat di luar gedung bioskop dan disiplin masyarakat di dalam gedung bioskop saat pertunjukan film. Disiplin masyarakat di luar gedung bioskop berkaitan dengan dua hal pokok yaitu disiplin pada saat membeli tiket, disiplin pada saat menunggu pertunjukan berlangsung dan disiplin yang berkaitan dengan batas umur penonton.

Disiplin masyarakat pada waktu membeli tiket anatar lain berkaitan dengan (1) jumlah penonton (2) waktu penjualan tiket dan (3) tempat/loket penjualan tiket. Jumlah penonton yang ada berkaitan dengan film yang dipertunjukkan. Jumlah penonton ini menyebabkan terjadi tidaknya antrean pada waktu membeli tiket atau tidak. Dalam kenyataannya kecenderungan untuk

untuk berkerumun secara tidak teratur di muka loket berlangsung pada saat jumlah penontonnya banyak. Dan hal ini diperparah dengan gedung bioskop yang loket penjualan tiketnya tidak terdapat jalur untuk antri penonton. Demikian halnya pada waktu akan masuk ke gedung bioskop pada saat pertunjukan akan dimulai kecendrungan untuk saling dulu masih mewamai gedung bioskop di Palembang. Hal ini menjadi lebih tidak teratur pada gedung bioskop yang tidak ada nomor kursinya. Jumlah loket penjualan tiket pada masing-masing gedung bioskop rata-rata 2 loket. Semakin banyak jumlah loket penjualan memungkinkan penonton dengan lebih leluasa untuk dapat memperoleh tiket. Dalam Kondisi jumlah penonton sangat banyak, Calo berkecendrungan untuk muncul. Calo ini mempunyai potensi untuk muncul pada gedung-gedung bioskop yang terdapat nomor kursinya. Peringatan yang merupakan harapan agar penonton antri tertempel di dinding loket bagian muka, dan peringatan untuk hati-hati dengan copet terpampang dengan jelas. Dengan kata lain disiplin masyarakat pada waktu membeli tiket sebenarnya berkaitan dengan sejumlah faktor di atas.

Disiplin masyarakat untuk menjaga kebersihan di ruang tunggu dan halaman gedung bioskop berdasarkan pengamatan yang dilakukan ternyata belum sepenuhnya ada. Peringatan yang berupa tulisan " Jagalah Kebersihan " dan buanglah sampah pada tempatnya terpampang dengan jelas di dinding. Kota-kotak sampah pada umumnya disediakan oleh pihak pengelola gedung bioskop yang diletakan di ruang tunggu dan di halaman gedung bioskop. Pihak pengelola dalam hal ini juga menyediakan petugas untuk secara rutin menjaga kebersihan. Dalam kenyataannya kadangkala ditemui puntung rokok, bungkus permen, kulit kacang dan lain sebagainya yang terserak dilantai. Memang dalam hal ini sangsi formal maupun informal untuk perilaku demikian ini tidak ada. Justru petugas gedung bioskoplah yang harus membersihkannya.

Disiplin masyarakat yang berkaitan dengan batas umur penonton berkaitan dengan batas umur dewasa (17 tahun) dan batas umur anak-anak (13 tahun). Ketentuan batas umur untuk pertunjukan film ini berasal dari BSF (Badan Sensor Film). Kepatuhan pengelola Gedung bioskop terhadap batas umur ini antara lain pada iklan film secara tersirat dinyatakan untuk umur berapa film ini dapat dilihat. Usaha lain dilakukan dengan menugaskan kepada penjaga pintu masuk untuk mendeteksi penonton yang diperkirakan tidak sesuai dengan batas umur yang disyaratkan. Dalam hal ini petugas mengandalkan pengalamannya berdasarkan fisik penonton. Berdasarkan pengalaman petugas gedung bioskop Garuda dan Cineplek kecendrungan pelanggaran batas umur ini sering dijumpai untuk film-film porno dan film-film sadis. Pelanggarnya

pada umumnya pelajar SLP. Cara yang digunakan petugas dalam mendeteksi umur ini adalah dilakukan pada penonton yang secara fisik meragukan umurnya. Kemudian ditanyai yang berkaitan sekolahnya, kelas berapa serta penampilan fisiknya. Dalam kasus bahwa penonton yang tidak memenuhi syarat diajak oleh orang tuanya, petugas pintu memberikan toleransi dengan alasan orang tuanyalah yang mengajak, sehingga tanggung jawab sepenuhnya pada orang tuanya.

Disiplin masyarakat di dalam gedung bioskop, dalam hal ini penonton berkaitan dengan disiplin untuk duduk di kursi sesuai dengan nomor kursinya, disiplin untuk tidak merokok, disiplin untuk menjaga kebersihan dan disiplin untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Disiplin penonton untuk duduk dikursinya terdapat pada gedung bioskop yang ada nomor kursinya. Berdasarkan pengamatan, penonton yang pindah kursi berlangsung pada saat film mulai diputar. Hal ini berkaitan dengan keinginan penonton untuk memperoleh sudut pandang yang lebih menguntungkan. Dalam keadaan penonton yang tidak banyak perpindahan tempat duduk tidak menimbulkan masalah serius. Sebaliknya dalam kondisi penonton yang banyak, bantuan petugas sangat berperan untuk mengatur disiplin penonton ini.

Larangan untuk tidak merokok pada saat di dalam gedung bioskop terpampang jelas di dinding dan hal ini juga diperingatkan melalui layar. Dalam kenyataannya, penonton yang melanggar untuk tidak merokok secara rutin terjadi. Proporsi yang melanggar memang kecil, tetapi kecenderungan untuk adanya penonton yang merokok akan selalu dijumpai. Dalam hal ini peranan petugas gedung bioskop sangat besar untuk menegur mereka ini. Biasanya kalau ditegur, penonton mau untuk mematikan rokoknya.

Kebiasaan penonton untuk makan makanan kecil sambil melihat pertunjukan film, hampir merata. Kebiasaan ini ternyata tidak diimbangi dengan kesadaran untuk membuang sampah ketempatnya. Banyaknya sampah yang berserakan pada saat disapu selama pergantian jam pertunjukan menunjukkan bagaimana tingkat disiplin penonton di dalam gedung bioskop. Aneka sampah dapat dijumpai, seperti plastik bekas bungkus makanan, kulit kacang, kotak minuman, kertas dan lain sebagainya.

Keluhan pengelola gedung bioskop di Palembang adalah kecenderungan untuk rusaknya jok tempat duduk/kursi penonton. Kerusakan ini antara lain disiletnya jok kursi, robeknya jok kursi, dicoret-coretnya jok kursi dan terdapatnya bekas permen karet di jok kursi. Pengelola gedung sulit untuk mendeteksi pelaku dari pengrusak ini, dikarenakan tidak terdapatnya identitas penonton pada masing-masing kursi yang didudukinya.

Tidak terdapat alasan atau motivasi yang jelas dari kebiasaan ini. Berdasarkan pengalaman jumlah kerusakan akan bertambah dalam kondisi penonton merasa tidak puas dengan film maupun dengan pelayanan yang diperolehnya seperti listrik mati, film terputus-putus dan lain sebagainya.

Disiplin masyarakat di tempat hiburan antara lain juga dapat dilihat di taman-taman. Dalam hal ini Taman dibedakan menjadi taman wisata/hutan wisata dan taman rekreasi. Taman wisata di kota Palembang adalah Hutan Wisata Pundi Kayu dan Taman Bukit Siguntang. Sedangkan taman rekreasinya antara lain taman Garuda, taman Plaju, taman Pusri dan lain sebagainya.

Fasilitas yang terdapat di taman Pundi Kayu berupa hutan wisata beserta perangkatnya dan fasilitas bermain anak-anak. Larangan untuk merusak hutan wisata seperti pohon-pohon yang ada serta fasilitasnya terpampang di jalan pintu masuk. Taman wisata ini masih relatif baru sehingga kondisi fasilitasnya relatif masih terawat. Hal ini dari satu sisi merupakan indikator bahwa disiplin masyarakat cukup baik. Dilain pihak mudah juga ditemukan coretan-coretan yang tidak menyolok pada tempat-tempat untuk bersantai. Dapat dipastikan bahwa coretan ini makin lama akan bertambah banyak sejalan dengan bertambah lamanya fasilitas yang ada.

Taman rekreasi taman Garuda yang berada di Km. 5 merupakan taman yang terbuka untuk umum dengan tanpa dipungut biaya. Taman ini sudah banyak yang mulai rusak, dimana keruskannya ada yang disebabkan karena keisengan pengunjung dan ada yang secara alami. Perilaku orang yang duduk di pagar taman, tiduran di kursi-kursi taman, makan nasi bungkus di taman mudah dijumpai setiap saat. Pemeliharaan taman ini sepenuhnya dilakukan oleh petugas yang ada.

D. DISIPLIN MASYARAKAT DI JALAN RAYA

Pengertian jalan raya adalah jalan dimana lalu lintas kendaraan dan manusia menggunakannya untuk prasarana mobilitas. Jalan raya di Palembang berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal seperti telah diuraikan di bagian muka. Sedangkan berdasarkan kekuatan poros, jalan raya dibedakan menjadi jalan raya kelas I, kelas II, kelas III dan kelas IV. Sampai sekarang ini jalan raya di kota Palembang belum ada yang kelas I.

Yang memanfaatkan jalan raya meliputi kendaraan bermotor, kendaraan bukan bermotor dan manusia. Pada jalan-jalan kelas II di kota Palembang dan juga jalan arteri dan kolektor pada khususnya jalan raya sebagian besar dimanfaatkan oleh kendaraan bermotor. Pada tempat-tempat yang ramai atau disekitar pusat kegiatan, manusia juga banyak memanfaatkan jalan raya ini. Jalan raya biasanya terdiri dari badan jalan dan trotoar. Trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki, dan badan jalan untuk kendaraan.

Kendaraan bermotor yang menggunakan jalan raya meliputi kendaraan roda dua (motor) dan roda empat (mobil). Kendaraan roda dua ini berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi dua yaitu ojek dan motor pribadi. Sedangkan mobil dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan mobil angkutan penumpang dan barang. Terdapat syarat-syarat tertentu bagi pengendara motor atau mobil untuk secara syah dianggap mempunyai kemampuan untuk mengendarai motor atau mobil di jalan raya. Demikian hal untuk motor atau mobil terdapat persyaratan tertentu untuk dianggap laik jalan.

Bukti formal bahwa seseorang itu dianggap sudah mampu mengendarai motor atau mobil di jalan raya adalah dengan dikeluarkannya SIM (Surat Izin Mengendarai) yang dikeluarkan oleh Polantas (Polisi Lalu Lintas). Bukti formal ini berbeda-beda seperti SIM C untuk motor, SIM A untuk mobil pribadi yang bukan angkutan barang atau penumpang, SIM A Umum untuk angkutan penumpang atau mobil kecil dan SIM B dan B Umum untuk mobil barang dan penumpang besar.

Untuk memperoleh SIM dilakukan berdasarkan persyaratan-persyaratan tertentu dan dengan melalui ujian kemampuan baik teori maupun praktek. Ujian teori lebih ditujukan untuk menguji tingkat kemampuan seseorang dalam memahami rambu-rambu lalu lintas yang ada. Sedangkan ujian praktek dimaksudkan untuk menguji tingkat kemampuan praktek seseorang dalam mengendarai motor atau mobil. Dengan dimilikinya SIM berarti seseorang itu dianggap telah mempunyai kemampuan teoritik dan praktek dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

Persyaratan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor untuk dapat jalan di jalan raya yaitu keharusan untuk melengkapi surat-surat kendaraan bermotornya setiap setahun sekali. Surat ini sebagai bukti atau identitas kendaraan bermotor bahwa kendaraan ini telah membayar pajak kendaraan dan sekaligus sebagai bukti dari Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Disamping STNK, bagi kendaraan niaga diwajibkan mempunyai surat laik jalan dan

surat izin trayek. Untuk urusan disiplin masyarakat di jalan raya instansi yang berwenang mengawasi dan mengelolanya adalah Polisi Lalu Lintas. Polantaslah yang akan mengatur kelancaran lalu lintas jalan raya.

Disiplin masyarakat di jalan raya berkaitan dengan bagaimana masyarakat itu mau berperilaku di jalan raya sesuai dengan fungsi dari jalan serta berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Pedoman sekaligus batasan perilaku pengguna jalan raya ada disepanjang jalan raya yang diatur dengan melalui rambu-rambu lalu lintas. Dengan rambu lalu lintaslah pengguna jalan raya dituntun untuk berperilaku agar tidak membahayakan dirinya maupun orang lain.

Gambaran dari tingkat disiplin masyarakat di jalan raya diantaranya dapat dilihat dari tingkat kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Gambaran ini, di kota Palembang adalah dalam tabel IV. 6

TABEL IV. 6
KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG

No.	Tahun	Jumlah	Meninggal	Luka	Kerugian
1.	1988	833	57	611	-
2.	1989	482	41	342	22.065 juta
3.	1990	337	29	289	51.900 juta

Sumber : Palembang dalam angka 1990

Secara kuantitatif tabel di atas memberikan informasi bahwa jumlah kecelakaan di jalan raya menunjukkan kecenderungan semakin menurun dari tahun ke tahun. Dilain pihak secara kuantitatif jumlah kerugiannya justru meningkat. Dari sisi ini secara umum dapat diperkirakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat di jalan raya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jalan raya di kota Palembang yang paling banyak menimbulkan kecelakaan adalah jalan-jalan ramai artinya jalan raya yang banyak digunakan. Frekwensi kecelakaan lalu lintas di jalan raya kota Palembang adalah sebagai berikut :

TABEL IV. 7
KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA KOTA PALEMBANG

No.	Jalan	1989	1990
1.	Jl. Jend. Sudirman	74	56
2.	Jl. Merdeka	43	17
3.	Jl. Kapt. A. Rivai	21	16
4.	Jl. Salim Batubara	12	8
5.	Jl. Veteran	28	20
6.	Jl. A. Yani	32	22
7.	Jl. Wahid Hasyim	44	23
8.	Jl. May. Ruslan	6	6
9.	Jl. Angkatan 45	4	3
10.	Jl. Demang Lebar Daun	8	9
11.	Jl. Basuki Rahmad	51	11
12.	Jl. Kol. Burlian	-	34
13.	Lain - lain	7.	112

Sumber : Palembang dalam angka 1990

Kecelakaan yang terjadi berdasarkan tabel di atas menunjukkan banyak terjadi di jalan-jalan arteri. Memang dapat dimengerti mengapa kecelakaan lalu lintas banyak terjadi di jalan arteri ini. Disamping padat, khususnya pada saat-saat jam sibuk, kendaraan yang menggunakan jalan arteri ini sangat bervariasi, seperti bus kota, oplet/taxi, kendaraan pribadi, motor dan lain sebagainya. Sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas berkaitan dengan banyak faktor, antara lain kepadatan lalu lintas, sarana dan prasarana jalan raya serta kepatuhan pengguna jalan raya terhadap peraturan-peraturan lalu lintas.

Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas inilah yang merupakan pencerminan dari disiplin masyarakat di jalan raya. Sarana yang disediakan dalam tingkat tertentu sudah ada, seperti jembatan penyebrangan, zebra cross, rambu lalu lintas dan lain sebagainya.

Disepanjang jalan raya dijumpai adanya petugas (Polisi Lalu Lintas) yang mengatur kelancaran lalu lintas. Berdasarkan pengamatan di jalan raya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas menjadi semakin tinggi dalam keadaan adanya petugas (Polisi) yang berjaga secara nyata di jalan raya. Dalam keadaan yang demikian ini kepatuhan masyarakat lebih disebabkan karena petugas dan bukannya pada peraturan. Hal ini diakui oleh petugas lapangan, bahwa petugas lalu lintas untuk setiap saat berpatroli dimaksudkan agar masyarakat menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Hal senada terdapat dalam pandangan pengguna jalan raya, bahwa ketaatan dalam berlalu lintas/keinginan untuk melanggar rambu lalu lintas antara lain berkaitan dengan kehadiran petugas.

Kehadiran petugas secara rutin dapat ditemukan di persimpangan jalan, tempat-tempat yang ramai dan patroli secara rutin. Menurut informasi petugas lapangan ini, kecendrungan pengguna jalan raya untuk melanggar rambu-rambu lalu lintas selalu dijumpai, khususnya pengendara motor dan pengendara kendaraan angkutan penumpang.

Pelanggaran yang dilakukan pengendara motor seperti berjalan tidak apada jalan yang diperuntukan, melanggar lampu jalan dan melanggar kecepatan serta mengendarai motor secara zig-zag. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan kendaraan angkutan umum seperti bus kota dan oplet/taxi sebagian besar berupa berhenti untuk menaik dan menurunkan penumpang di sembarang tempat. Dalam kondisi semacam ini tidak sepenuhnya pengendara angkutan umum, juga penumpangnya yang menghentikan kendaraan disembarang tempat. Bagi sopir kendaraan ini, keharusan untuk menyeter dalam jumlah tertentu merupakan target utama dalam mengendarai kendaraannya. Dimana ada penumpang, maka kebiasaan kendaraan umum ini akan selalu mengambalnya. Andaikan tidak diambil pasti penumpang yang menghentikan kendaraan bukan pada tempatnya akan diambil oleh kendaraan umum yang lain. Disepanjang rute angkutan penumpang ini telah ada beberapa halte dan rambu-rambu tempat pemberhentian kendaraan angkutan penumpang ini. Dalam kenyataannya pelanggaran terhadap keduanya mudah sekali ditemui.

Orientasi sopir kendaraan angkutan umum pada penumpang yang dikarenakan jumlah setoran yang harus diserahkan setiap harinya (bus kota Rp. 125.000 - 160.000; oplet Rp. 12.000 - 20. 000) menyebabkan pada jam-jam sibuk bus kota akan dijumpai penumpang yang berjejalan.

Pada kendaraan pribadi, termasuk diantaranya motor pelanggaran yang banyak terjadi adalah ketidak lengkapan surat-surat mobil/motor seperti SIM dan STNK. Kasus yang banyak terjadi, menurut penuturan petugas Polantas adalah tidak punya SIM / STNK; ketinggalan dan sudah kadaluarsa

Disiplin pengendara motor dalam perparkiran, mempunyai dimensi yang luas. Parkir diparkiran dapat dibedakan menjadi dua yaitu parkir pada tempat yang ramai dan parkir pada tempat yang bukan ramai. Perparkiran di kota Palembang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Untuk ini tempat-tempat parkir kendaraan secara sengaja disediakan petugas yang dimaksud untuk mengatur kendaraan yang parkir sekaligus kelancaran lalu lintas dan untuk memudahkan penarikan retribusi parkir. Berdasarkan pengamatan lapangan pusat-pusat pertokoan di Palembang yang mempunyai tempat parkir secara khusus baru tiga tempat yaitu International Plaza dan Bandung Super Market dan Marathon Super Market sedangkan pusat perbelanjaan dan pusat-pusat pertokoan tidak mempunyai tempat parkir secara khusus dan tempat parkirnya menggunakan trotoar atau pinggir jalan.

Perparkiran di kota Palembang, dalam pengelolaannya terdapat kecenderungan lebih mengutamakan retribusi dibandingkan dengan kelancaran lalu lintas. Dalam hal ini petugas parkir mempunyai peranan yang cukup besar untuk penarikan retribusi. Kadangkala petugas parkir tidak memperhatikan tempat parkir yang digunakan merupakan larangan atau tidak, yang penting retribusi parkir diperoleh. Sulitnya mencari tempat parkir menyebabkan pengendara motor kurang memperhatikan tempat perparkiran ini.

Kalau diperhatikan, disiplin masyarakat dalam perparkiran menunjukkan disiplin yang tinggi dalam kondisi sarana parkir tersedia dan terdapatnya petugas yang mengelolanya. Sebaliknya dalam kondisi sarana parkir terbatas, tempat parkir menunjukkan kecenderungan untuk semrawut dan berkecenderungan untuk mengganggu kelancaran lalu lintas.



Gambar 5. Jembatan Penyebrangan di Jalan Utama

BAB V

UPAYA - UPAYA PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT

Moto Palembang sekarang ini adalah Palembang BARI (Bersih, Aman, Rapi dan Indah). Moto Palembang Bari ini merupakan semacam acuan psikologis dalam mengupayakan terciptanya kota Palembang seperti motonya. Implementasi untuk mewujudkan Palembang Bari telah dilakukan dengan sejumlah usaha dan kegiatan untuk dapat menampilkan kota Palembang sebagai kota yang bersih, aman, indah dan rapi. Usaha untuk mewujudkannya sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkepentingan dan merupakan warga kota Palembang. Artinya masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak swasta merupakan unsur-unsur yang secara langsung bertanggung jawab dalam mewujudkan Palembang Bari ini.

Untuk mewujudkannya setidaknya berkaitan dengan tiga dimensi utama yaitu (1) dimensi sistem (2) dimensi sarana dan (3) dimensi peran serta masyarakat. Bidang sistem merupakan keterkaitan keseluruhan unsur yang terlibat dalam kegiatan ini baik dalam sifatnya yang statis maupun dinamis yang diwujudkan dalam struktur maupun fungsinya. Dimensi sistem ini antara lain berkaitan dengan pengelolaan serta falsafah pengelolannya. Dimensi sarana merupakan instrumen fisik yang tersedia untuk melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya mewujudkan Palembang Bari. Dimensi keterlibatan masyarakat merupakan dimensi dimana subyek dari moto Palembang Bari dapat secara aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan Palembang Bari ini.

Dari ketiga dimensi di atas, dimensi ketiga inilah secara langsung merupakan pencerminan sampai seberapa jauh keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan kota Palembang Bari. Tingkat keterlibatan masyarakat inilah merupakan pencerminan disilin masyarakat kota Palembang mempunyai makna yang dalam sebagai dasar pembinaan untuk lebih meningkatkan disiplin masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan Palembang Bari secara sepiantas telah menghasilkan perubahan kota Palembang menjadi kota yang lebih bersih, lebih rapi, lebih indah dan lebih aman. Bukti-bukti empiris tentang hal ini terlihat dengan semakin bersihnya kota Palembang dari sampah, munculnya taman-taman di sudut atau di pinggir jalan, dibangunnya trotoar disepanjang jalan-jalan utama dan lain sebagainya. Kesadaran masyarakat akan moto kota Palembang ditunjukkan dengan gejala-gejala seperti semakin bertambahnya depot-depot tanaman hias sepanjang jalan-jalan yang relatif strategis, kecendrungan untuk semakin bertambahnya sistem pengelolaan sampah yang ditangani warga dan lain sebagainya.

Dilain pihak terdapat pertanyaan dan permasalahan yang berkaitan dengan sampai seberapa jauh partisipasi masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan Palembang Bari. Gejala-gejala yang dapat dikatakan sebagai perilaku ketidakdisiplinan dan kepatuhan masyarakat mudah dijumpai di tempat-tempat umum. Gejala seperti membuang sampah dari mobil yang sedang berjalan, sampah yang menumpuk di pekarangan rumah, bermunculannya pedagang kaki lima dalam kondisi petugas tidak ada, munculnya pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dalam keadaan petugas polisi tidak ada dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa disatu sisi disiplin, ketertiban dan juga kepatuhan itu sudah muncul di lain pihak ketidakdisiplinan, ketidak patuhan dan ketidak tertiban juga masih mudah ditemui. bagaimanakah kewajiban, larangan dan ancaman hukuman yang ada dalam mengupayakan hal diatas. Dalam hal ini Perda Nomor 3 Tahun 1981 setelah disempurnakan dengan Perda Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Kesehatan Umum dan ketertiban kota merupakan acuan formal dalam mengupayakan peningkatan disiplin masyarakat kota Palembang. Dalam Perda ini diatur 3 hal pokok yaitu (1) Kewajiban warga masyarakat (2) Larangan warga masyarakat dan (3) Ancaman hukuman.

Kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga kota Palembang meliputi 7 hal pokok yaitu :

1. Memelihara dengan baik dan bersih persilnya dan segala sesuatu yang ada pada persil tersebut (Pasal 2)

2. Menyimpan/membuang sampah dalam kotak sampah, kantung plastik, kardus dekat pada pintu halaman/bangunan dan menyimpannya kembali pada tempat yang tidak terlihat dari jalan (Pasal 3)
3. Pedagang dan Pengusaha diwajibkan membersihkan dan membuang sampah akibat dari pekerjaannya ke tempat sampah yang disediakan sebelum meninggalkan tempat usaha (Pasal 5)
4. Pemilik persil diwajibkan memberitahukan kepada ketua RT/pejabat setempat bilamana ada bangkai besar pada persilnya selambat-lambatnya 18 jam setelah kematian binatang dan menyerahkan bangkai tersebut kepada petugas yang ditunjuk (Pasal 9) .
5. Kewajiban bagi pemilik persil untuk menjaga segala tempat penampungan air bebas dari nyamuk (Pasal 10)
6. Pedagang minuman atau makanan diwajibkan menutup dagangan dengan sempurna agar debu tidak masuk dan menggunakan air bersih untuk mencuci piring, gelas dan barang lainnya yang dipergunakan untuk berdagang.
7. Pemilik persil diwajibkan menebang/memangkas pohon/pagar yang dikawatirkan akan tumbang dan mengganggu ketertiban (Pasal 13) .

Larangan yang tercantum dalam perda ini meliputi 3 larangan pokok yang ditunjukkan kepada masyarakat umum. Larangan dimaksud antara lain :

1. a. Dilarang untuk menyebarkan, menempelkan selebaran, poster, slogan disepanjang jalan atau bangunan tanpa izin.
- b. Menguras sptitank yang mengeluarkan bau dan membuang kotorannya disembarang tempat.
- c. Membakar tumpukan sampah kecuali pada tempat yang sudah ditentukan.
- d. Membuang sampah atau barang-barang bekas dan bangkai binatang dijalan, sungai, got, riol dan taman-taman.
- e. Memanjat/merusak pohon-pohon pelindung atau merusak pagar dan tanaman serta bangunan-bangunan taman.
- f. Berjalan dan bermain-main di lapangan rumput taman.
- g. Mandi dan mencuci di kolam-kolam umum/air mancur yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- h. Mencuci kendaraan di pinggir/di atas jalan dan disekitar kolam umum.
- i. Melepaskan temak berkaki empat berkeliaran di jalan/taman.
- j. Menjemur pakaian / barang-barang cucian lainnya yang kelihatan dari jalan (Pasal 8)

2. a. Menggunakan sampah untuk menimbun persil tanpa seizin walikota.
- b. Mengubur bangkai-bangkai binatang besar dipekarangan atau membuangnya di sungai.
- c. Membuat pagar atau pembatas dari bahan-bahan yang berongga, kecuali apabila bagian yang berongga ditutup (Pasal 12)
3. a. Berada dijalan/tempat umum membawa atau memakai senjata tajam dan sejenisnya,kecuali bagi yang berhak.
- b. Menjual bensin/bahan bakar dipinggir jalan.
- c. Menggunakan trotoar untuk tempat kerja.
- d. Memperbaiki, menyimpan kendaraan di jalan dan trotoar.
- e. Memarkir kendaraan di atas trotoar dan kaki lima.
- f. Mendirikan tenda/alat lain sebagai tempat berjualan di jalan termasuk trotoar, kecuali pada tempat yang sudah diizinkan walikota.
- g. Menempatkan peti/keranjang atau benda-benda penting di jalan dan trotoar.
- h. Bermain ketapel, layang-layang dan lain-lain di jalan-jalan dan tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban (Pasal 15)

Sedangkan ancaman hukuman terhadap kewajiban dan larang yang dilanggar, dalam perda ini diatur dalam pasal 18, yang menyebutkan bahwa pelanggaran dan atau kelalaian atas ketentuan yang tersebut dalam peraturan Daerah ini diamcam dengan pidana kurungan selama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,-

Dari Perda ini secara jelas sudah diatur tentang bagaimana masyarakat harus melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Ketertiban dan disiplin masyarakat masih terdapat bidang-bidang tertentu selain yang diatur dalam perda, tetapi diatur dalam peraturan lalu lintas, maupun ketentuan tidak tertulis lainnya seperti disiplin antarhubungan tetangga, keramaian, di tempat umum dan lainnya. Anggapan bahwa tingkat disiplin dan ketertiban masyarakat masih perlu ditingkatkan terus terdapat dalam semua pihak yang berkepentingan dengan masalah ini. Meskipun juga diakui bahwa peningkatan disiplin dan ketertiban telah diusahakan terus dengan hasil yang terus meningkat.

A. UPAYA PENINGKATAN DISIPLIN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH.

Pemerintah Daerah Kotamadia Tingkat II Palembang sangat concern sekali dengan masalah peningkatan disiplin serta ketertiban masyarakat ini. Hal ini berkaitan secara langsung dengan keberhasilan Palembang Bari, dan keinginan

Kota Palembang untuk memperoleh Adipura yaitu penghargaan sebagai kota yang bersih rapi, teratur dan indah. Peningkatan disiplin dan ketertiban dan kepatuhan masyarakat oleh pemerintah daerah tingkat II Kotamadia Palembang ditempuh dengan dua cara sekaligus dan bertahap. Sifat peningkatan ini ada yang dilakukan secara represif dan ada pula yang dilakukan secara restetatif. Cara-cara yang dilakukan oleh Pemerintah daerah antara lain:

1. Operasi Yustisi

Operasi Yustisi dimaksudkan untuk menegakan Perda Nomor 8 tahun 1978. Sampai sekarang ini operasi ini telah sampai operasi ketiga dan kemungkinan akan berlanjut terus sampai ketertiban dan disiplin masyarakat berdasarkan Perda ini dianggap sudah dapat tumbuh. Operasi Yustisi atau yang dikenal juga OPS Bari III Kodia Palembang dilakukan oleh satu tim yang terdiri dari instansi-instansi terkait. Pada intinya Tim ini terdiri dari dua bagian yaitu pelaksana razia yang terdiri dari (1) tim monitoring 2 (PPNS (3) Ketertiban (4) Hansip (5) DKK (6) Kepolisian (7) Anggota Kodim (8) Dinas P U dan (9) Biro Hakim. Sedangkan Tim penyelesaian perkara dilakukan dengan Pengadilan yang terdiri dari (1) Hakim (2) Jaksa (3) PPNS (4) Panitera dan (5) Polisi.

Menurut ketua Tim Yustisi, Drs. Bursali Djaun, target operasi Yustisi ini adalah (1) Palembang Bari dan (2) Adipura. Tujuan dari operasi ini antara lain adalah membudayakan Bari. Operasi ini dilakukan pada 27 jalur jalan utama di kota Palembang. sasaran operasi ini adalah mereka yang mempunyai areal pada jalur operasi, bertanggung jawab terhadap arealnya. Kebersihan, ketertiban masyarakat di 27 jalur merupakan prioritas dalam operasi ini. Pedagang kaki lima, perilaku masyarakat dalam menjaga persilnya sesuai ketentuan - ketentuan dalam Perda merupakan sasaran operasi ini.

Hasil operasi menunjukkan bahwa pada jalur yang menjadi daerah operasi menunjukkan kecendrungan daerah yang semakin bersih dan tetib. Jumlah warga masyarakat yang sudah terjaring selama 3 bulan operasi ada sejumlah 403 orang dan sebagian besar baru terjaring sekali. Perincian dari yang terkena operasi yaitu pertokoan yang tidak memelihara kebersihan 63, kendaraan truk yang mengangkut tanah karena mengotori jalan 34 dan pedagang kaki lima 306. Dari jumlah di atas yang sudah diadili 391.

Pelaksanaan operasi Yustisi ini masih terbatas pada jalur jalan dan belum masuk pada daerah pemukiman. Sehingga sasaran pengguna jalanlah yang terkena operasi. Pelaksanaan operasi pada daerah-daerah yang dianggap rawan dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan

dan kelurahan di mana operasi Yustisi dilakukan. Sebaliknya pada daerah yang dianggap tidak rawan operasi dilakukan dengan tanpa melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan maupun kelurahan. Sifat oprasi ini merupakan upaya penegakan disiplin dan kepatuhan masyarakat secara repesif. salah satu kelemahannya adalah kecendrungan untuk munculnya kepatuhan bilamana tekanan itu muncul secara simultan. Dalam kondisi tekanan tidak muncul secara konsisten maka disiplin dan kepatuhan menunjukkan kecendrungan yang semakin menurun. Kasus kucing-kucingan antara petugas operasi dan pedagang kaki lima misalnya banyak mewarnai aktivitas pedagang kaki lima. Khusus pedagang kaki lima yang banyak terjaring operasi Yustisi adalah dari Medan, Padang dan Komerling serta orang baru yang berasal dari luar Palembang.

2. Gerakan Kebersihan

Gerakan kebersihan dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadia Palembang yang dimaksudkan untuk lebih memasyarakatkan kebersihan warga masyarakat di lingkungannya masing-masing. Gerakan kebersihan ini wajib dilakukan oleh instansi pemerintah yang ada di Kotamadia Palembang untuk melakukan gerakan kebersihan dibawah komando ketua atau kepala instansi yang bersangkutan. gerakan kebersihan ini dilakukan setiap hari jum'at pagi sekitar satu sampai dua jam untuk secara bersama-sama melakukan kebersihan.

Hasil dari gerakan ini menunjukkan bahwa lingkungan perkantoran lebih bersih dan rapi dibandingkan sebelum ada gerakan ini. Sebagai suatu gerakan, memang tidak jelas kontraprestasi yang dapat diterima oleh yang melakukan atau terlibat dalam gerakan ini. Hal inilah yang barangkali merupakan salah satu sebab utama mengapa gerakan kebersihan bilaman diperhatikan dari waktu kewaktu menunjukkan kecendrungan yang semakin menurun. Untuk itu perlu kiranya dilakukan dengan konsistensi yang tinggi yaitu yang disertai dengan adanya kontraprestasi.

3. Lomba R T.

Lomba RT dilakukan oleh pemerintah daerah dimaksud untuk memotivasi terwujudnya lingkungan yang bersih, rapi, indah dan sehat. Lomba RT pada umumnya dikaitkan dengan peringatan hari-hari besar nasional maupun ulang tahun kota. Konsistensi lomba RT ini biasanya hanya sekali dalam setahun



Gambar 6. Pengadilan Bagi Pelanggar Ketertiban

dan biasanya evaluasi lebih lebih ditujukan pada aspek fisik semata penampilan sesaat yang sifatnya formal pada saat penilaian dilakukan. Dalam kondisi yang demikian ini sebenarnya lomba RT sebagai usaha yang lebih bersifat seremonial. Usaha pemerintah ini menunjukkan lingkungan RT yang relatif bersih, setidaknya masyarakat termotivasi untuk melakukan dan memikirkan bentuk-bentuk gotong royong untuk lebih meningkatkan keindahan dan kebersihan lingkungannya.

4. Penyuluhan-Penyuluhan

Penyuluhan tentang perlunya ditingkatkannya disiplin dan kepatuhan warga dalam menjaga kebersihan, keindahan, kerapian dan keamanan kota secara terus menerus dilakukan dengan berbagai cara. Cara dilakukan aparat pemerintah dari tingkat terendah sampai ke tingkat tinggi dilingkungan pemerintah daerah Tingkat II Kotamadia Palembang. Bentuk-bentuknya bermacam-macam seperti saresahan, simulasi dan lain sebagainya. Media yang digunakan antara lain dilakukan dengan melalui radio, Televisi, koran serta media visual lainnya.

5. Pembenahan Unit Pelaksana Pemerintah Daerah

Upaya ini berkaitan dengan keinginan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat dengan tersedianya sarana maupun prasarana yang lebih baik. Pembenahan ini antara lain dilakukan dengan :

- a. Penggantian dan penambahan personil baik unsur pimpinan maupun staf.
- b. Penambahan jumlah petugas lapangan dan petugas pengawas.
- c. Menambah volume kegiatan pelayanan.
- d. Penambahan sarana yang diperlukan seperti penambahan armada angkutan sampah.
- e. Pemanfaatan secara optimal bantuan gerobak sampah dari Yayasan Gotong Royong.
- f. Penambahan anggaran pembiayaan untuk penyediaan sarana maupun rehabilitasi sarana dari dana pinjaman A D B maupun dana APBN.

6. Pertemuan Ilmiah

Pertemuan Ilmiah dimaksudkan untuk mencari masukan-masukan dari kalangan akademik, yang berkaitan dengan aspek-aspek peningkatan disiplin dan ketertiban masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan mengadakan seminar Palembang Bari, seminar tentang tertib lalu lintas, seminar tentang disiplin dan kepatuhan masyarakat dan lain sebagainya.

B. UPAYA - UPAYA YANG DILAKUKAN MASYARAKAT

Kesadaran bahwa ketertiban dan disiplin masyarakat masih perlu ditingkatkan ada juga pada masyarakat. Dalam hal ini kesadaran masyarakat berada pada lapisan masyarakat yang termasuk dalam kelompok pimpinan, tokoh masyarakat maupun pemuka-pemuka masyarakat. Kelompok masyarakat ini mempunyai potensi yang besar untuk melakukan hubungan-hubungan sosial dengan masyarakat luas dengan lebih efektif. Keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat dalam upaya peningkatan disiplin dan kepatuhan masyarakat ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

1. Upaya Yang Dilakukan Secara Langsung

Upaya yang dilakukan secara langsung yaitu diadakannya tatap muka secara langsung antara tokoh masyarakat dengan masyarakat. Hubungan langsung ini dimungkinkan berlangsungnya dialog timbal balik antara tokoh atau pemuka masyarakat dengan warga masyarakat dalam mendiskusikan suatu permasalahan. Bentuk-bentuk yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dapat melalui pertemuan bulanan di RT, pengajian atau pertemuan khusus yang membicarakan masalah ini. Suara tokoh masyarakat ini pada umumnya relatif didengar, seperti ajakan untuk melakukan gotong royong.

2. Upaya Yang Dilakukan Secara Tidak Langsung

Upaya ini dimana pemuka-pemuka masyarakat memberikan masukan untuk meningkatkan disiplin dan ketertiban masyarakat dengan tidak secara langsung kepada masyarakat, melainkan melalui sarana-sarana lain seperti melalui tulisan di media massa, seminar maupun pertemuan-pertemuan insidental.

3. Upaya Yang Dilakukan Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi-organisasi kemasyarakatan yang banyak terlibat dalam upaya meningkatkan disiplin dan keterlibatan masyarakat antara lain LKMD, Karang Taruna, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Pramuka, Organisasi Keagamaan dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan berupa tindakan nyata seperti kerjabakti, ikut operasi semut, pemungutan sampah dari rumah ke rumah dan bentuk-bentuk penyuluhan, ceramah, khotbah dan lain sebagainya. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan ini pada umumnya ada yang dikaitkan dengan perayaan hari Nasional, Ulang tahun organisasi, bulan bhakti dan lain sebagainya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian ini terdapat dua bagian pokok yaitu kesimpulan dan saran.

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan sumber informasi diperoleh kesimpulan bahwa Palembang Bari merupakan momentum yang sangat baik untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan warga masyarakat dalam rangka menciptakan kota yang tertib dan aman.
2. Secara administratif yuridis, sistem untuk terciptanya disiplin dan kepatuhan masyarakat sudah cukup baik. Perda Nomor 8 Tahun 1987 secara jelas dan tegas telah mengatur tentang larangan, kewajiban dan ancaman hukuman bagi yang melanggarnya. Sehingga bilamana Perda ini diterapkan secara konsisten kota Palembang dimungkinkan dengan mudah moto Bari cepat terealisasi.
3. Secara empirik, gambaran tentang disiplin dan ketertiban masyarakat kota Palembang masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya warga masyarakat yang melakukan pelanggaran - pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Perda.
4. Tingkat disiplin dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan temyatamasih sangat dipengaruhi oleh kehadiran petugas secara phisik di suatu tempat. Bilamana petugas yang berwenang tidak ada terdapat kecendrungan pelanggaran mempunyai frekuensi untuk meningkat.

5. Terdapatnya rambu atau papan-papan peringatan di tempat umum dalam derajat yang tinggi masih dijumpai pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan berkecenderungan bersumber pada masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghormati aturan tertulis.

Upaya peningkatan disiplin masyarakat secara umum mampu memperoleh hasil cepat dilakukan secara represif. Tetapi cara ini menunjukkan hasil yang relatif tidak langgeng.

Palembang Bari dengan usaha-usaha untuk mewujudkannya ternyata menunjukkan kecenderungan yang besar bahwa lingkungan kota Palembang semakin bersih, rapi dan indah, khususnya pada jalan-jalan protokol dan tempat-tempat umum.

B. SARAN-SARAN

Masuk-masukan yang sekiranya perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan disiplin dan ketertiban masyarakat adalah :

1. Dalam kondisi sekarang ini disiplin dan kepatuhan masyarakat masih sangat tergantung pada kehadiran petugas yang mempunyai wewenang. Untuk itu pada aspek-aspek disiplin yang ingin ditegakan perlu dipersiapkan kehadiran petugas secara rutin dan berwibawa pada daerah atau wilayah yang masyarakatnya ingin ditingkatkan disiplinnya.
2. Disiplin menunjukkan belum merupakan atau dianggap sebagai kebutuhan oleh masyarakat. Untuk itu kiranya perlu untuk segera dilembagakannya disiplin dengan lebih sistematis dan terencana oleh pemerintah yang diawali dengan tahap habituasasi yang terencana dengan baik.
3. Tuntutan peningkatan disiplin masyarakat tidak dapat dipisahkan dari sarana-sarana yang mendukungnya. Untuk itu penyediaan fasilitas yang memungkinkan disiplin dan ketertiban dapat meningkat perlu disediakan dengan memadai seperti tempat parkir, bak sampah, rambu lalu lintas yang jelas dan sebagainya.

4. Kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan disiplin masyarakat perlu tetap terus ditingkatkan dengan melibatkan unsur-unsur pemerintahan, organisasi-organisasi sosial maupun tokoh dan pemuka-pemuka masyarakat.

- Kondisi masyarakat kota yang terus berubah dengan cepat, kiranya perlu diantisipasi perkembangannya, agar sistem ketertiban dan disiplin yang sudah ada tidak menurun. Untuk itu peranan organisasi akan semakin besar dalam mewujudkan kepatuhan, ketertiban dan disiplin masyarakat. Sehingga perlunya dirumuskan job yang lebih jelas bentuk organisasi yang secara langsung menangani hal ini.
- 5.
 6. Sosialisasi yang berkaitan dengan disiplin anak, sebaiknya dihindarkan adanya inkonsistensi antara aspek - aspek yang diberikan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Untuk ini perlu kiranya suatu pedoman muatan materi peningkatan aspek-aspek disiplin yang disebarakan secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

Horton, Paul & Hunt ;

Sosiologi 1 Erkangga, Jakarta 1987

Hilda Zulkifli ;

Sampah dan Penanggulangannya di Kota Palembang,
Makalah Seminar 1992.

Surya Chandra S dan Tri Agus Susanto ;

Profil Keluarga Masyarakat Sumatera Selatan,
Laporan Penelitian 1990.

Kantor Statistik ;

Sumatera Selatan Dalam Angka 1990,
Kantor Statistik Propinsi Sumatera Selatan 1991

Kantor Statistik ;

Palembang Dalam Angka 1990,
Kantor Statistik Kotamadia Palembang 1991

Koencaraningrat ;

Masalah-Masalah Pembangunan,
LP3ES Jakarta.

DAFTAR INFORMAN

No.	N a m a	Umur	Pekerjaan
1.	Drs. Aminuddin MZ	53 Tahun	Kabag Pem Umum Kodia Palembang.
2.	Drs. HA. Merchan Mukti	50 Tahun	Kadis DKK Kodia Palembang
3.	M. Djon M.	55 Tahun	Kep. Satsiun Bus Kodia Palembang
4.	M. Raharja, SH	36 Tahun	Kabag Umum DKK Kodia Palembang
5.	Drs. A. Muin AZ	52 Tahun	Kep. Pasar Cinde Kadis Pasar Kodia Palembang
6.	Drs. Yusuf Akib	58 Tahun	Kadis Pasar Kodia Palembang
7.	M. Akil	43 Tahun	Kep. Pasar 16 ilir
8.	Drs. Bursali Djaun	42 Tahun	Ketua Operasi BARI III
9.	Drs. Munir Urup	43 Tahun	Seksi Monitoring Operasi BARI III

No.	N a m a	Umur	Pekerjaan
10.	Herman AR	31 Tahun	Petugas Terminal
11.	Ngali	42 Tahun	Petugas Terminal
12.	M. Ali	37 Tahun	Pengelola Gedung Bioskop " G "
13.	Zazili	32 Tahun	Pengelola Gedung Bioskop " S "
14.	M. Usman	28 Tahun	Petugas Gedung Bioskop
15.	A. Mutik	29 Tahun	Petugas Gedung Bioskop
16.	M. Tadjudin E, BA	31 Tahun	Bag. Pemerintahan Kec. Ilir Barat I
17.	Drs. Muchtar Malian	38 Tahun	Sekwilcam Ilir Barat I
18.	Yungsirwan.	35 Tahun	Bag. Pembangunan
19.	M. Muhklis Zen, BA	37 Tahun	Lurah 26 Ilir
20.	Khodri	57 Tahun	Ketua RT
21.	Syamsuddin	32 Tahun	Ketua RT
22.	Sri Suryati	34 Tahun	P K K
23.	Bharata	58 Tahun	Tokoh Masyarakat
24.	M. Ibrahim	32 Tahun	Tokoh Masyarakat
25.	M. Syamsuddin	42 Tahun	Ketua RT
26.	A. Tony L	36 Tahun	Polisi

No.	N a m a	Umur	Pekerjaan
27.	Makmur	28 Tahun	Petugas Kebersihan
28.	Sapawi	26 Tahun	Pedagang Kecil
29.	Sartono	31 Tahun	Sopir Bus Kota
30.	Bambang R	24 Tahun	Sopir Taxi

Perpustakaan
Jenderal

711